




KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



PERIODE 06 OKTOBER 2023



-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	Bekasi Bagikan Beras Cadangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	7	
Author	Wid/G-1	

Bekasi Bagikan Beras Cadangan

BEKASI - Lebih dari 600 kepala keluarga atau 1.600 jiwa Kabupaten Bekasi mendapat distribusi beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi terus bergerak mendistribusikan bantuan beras CPPD untuk desa rawan pangan tahun ini.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Kuswaya, Kamis (5/10) yang di-

kutip *bekasikabgoi*d, menuturkan, dia tengah menyalurkan bantuan beras tersebut untuk 609 KK atau 1.602 jiwa. Mereka tinggal di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi. "Sedangkan total bantuan beras yang didistribusikan mencapai 9.612 kilogram," tutur Kuswaya.

Menurutnya, berdasarkan kajian tahun lalu, desa Sukaringin ini masuk dalam kategori rentan pangan. Desa Sukarin-

gin sudah 2 kali gagal panen. Mengacu pada hasil kajian dan fakta tersebut, maka bantuan beras ini lalu dibagikan. "Beras sangat dibutuhkan warga Sukaringin," ungkap Kuswaya saat menyerahkan secara langsung bantuan CPPD tahun 2023 di Aula Kantor Desa Sukaringin, Rabu (4/10).

Kuswaya menerangkan, untuk tahun ini mengacu pada hasil monitoring Food Security

and Vulnerability Atlas (FSVA) atau peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun lalu, dia menyiapkan 95.545 kg bantuan beras CPPD untuk didistribusikan ke sejumlah daerah.

Rencananya dia juga akan verifikasi desa Sukawangi. Setelah diverifikasi mesti disetujui desa, kadus, dan RT/RW. Sesudah itu, kemudian baru dikeluarkan beras bantuan tersebut dari Bulog. ■ **wid/G-1**


Title	Harga Jagung Naik	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Antara/Siswowododo	

» Harga Jagung Naik



ANTARA/SISWOWIDODO

» Petani memanen jagung di Kedungguwo, Sukomoro, Magetan, Jawa Timur, Kamis (5/10). Harga jagung di tingkat petani di wilayah itu 5.900 rupiah per kilogram, lebih tinggi dibanding musim panen tahun lalu 4.000 rupiah per kilogram, yang menurut petani disebabkan meningkatnya kebutuhan pakan ternak ayam.

Title	Pangan Penentu Stabilitas Bangsa	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	Ers/YK/E-9	

Kebutuhan Pokok | Saat Ini, Sudah 22 Negara Melakukan Pembatasan Ekspor Pangan

Pangan Penentu Stabilitas Bangsa

- » Indonesia sudah terlalu lama menggantungkan kebutuhan pangan pada produksi impor.
- » Kebutuhan pangan meningkat, sementara produksi pangan tidak banyak sehingga mau tidak mau harus bergantung ke negara lain.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dalam amanatnya saat menghadiri perayaan HUT Ke-78 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/10), mengingatkan kalau krisis pangan tengah melanda dunia.

“Saya juga ingin mengingatkan, dunia sedang menghadapi krisis utamanya krisis pangan, akibat perubahan iklim, akibat terganggunya rantai pasok dunia,” kata Presiden Jokowi.

Saat ini, jelasnya, sudah ada 22 negara yang melakukan pembatasan ekspor pangan. Oleh karena itu, dia berpesan kepada seluruh anggota TNI untuk menyoroti hal itu dan peka terhadap urusan pangan.

“Oleh sebab itu, saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terkait ini, punya kesadaran dan kepekaan terkait ini karena urusan pangan adalah urusan perut, sangat penting dan penentu stabilitas bangsa,” kata Presiden.

« Apa yang menimpa beras pada saat ini juga akan terjadi pada semua komoditas pangan seperti terigu. Jika Indonesia tidak memulai diversifikasi pangan baik diversifikasi beras dan terigu, Indonesia bisa sangat kesusahan. »

DWIJONO HADI DARWANTO
Guru Besar Fakultas Pertanian dari UGM Yogyakarta

Guru Besar Fakultas Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan situasi hari ini menghendaki negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia untuk fokus pada kemandirian pangan nasional.

Hari-hari ini dan juga hari-hari ke depan, akan semakin banyak negara yang membatasi ekspor pangan terutama beras karena untuk cadangan pangannya negara itu sendiri.

Dwijono menyebut Indonesia kini telah mengimpor 11 juta ton terigu per tahun. Padahal, apa yang menimpa beras pada saat ini juga akan terjadi pada

semua komoditas pangan seperti terigu. Jika Indonesia tidak memulai diversifikasi pangan baik diversifikasi beras dan terigu, Indonesia bisa sangat kesusahan.

Terlalu lama negara ini, menurut Dwijono, menggantungkan dirinya pada impor. Terigu bisa impor 100 persen tanpa sedikit pun mengupayakan substitusinya di dalam negeri. Padahal, Indonesia memiliki banyak bahan pangan yang bisa mensubstitusi terigu.

“Sagu, singkong, sampai terakhir porang, semua bisa jadi substitusi. Tapi, tidak pernah digarap serius. Diversifikasi terigu dan beras harus dikerjakan jangan jadi wacana,” tandas Dwijono.

Peringatan Dini

Pengamat ekonomi yang merupakan Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan masalah pangan memang cukup lama menjadi perhatian. Menurutnya, dengan kebijakan banyak negara saat ini menahan pangannya seharusnya menjadi perhatian serius bagi Indonesia.

“Ini merupakan *early warning* agar kita waspada untuk menjaga pangan, harus secepatnya mencari mitra-mitra yang bisa secara resiprokal dan saling mendukung ketahanan pangan bila mana produksi lokal tidak cukup, tetapi memang produk lokal ini harus tumbuh kembali,” kata Heru.

Sebagai negara, papar Heru, seharusnya berdaulat dalam hal pangan dan ti-

dak bisa hanya berdiam tanpa berupaya meningkatkan produksi sendiri guna mencapai swasembada pangan.

“Komoditas yang cukup penting ini beras, sehingga ketika masing-masing negara menahan pangan, kita masih bisa *survive*. Ini yang kita juga khawatir, bahwa ketika semua negara menahan pangannya, sementara selama ini kita dinabobokan dengan mudahnya impor. Impor hanyalah strategi jangka pendek untuk mendapatkan produk dalam waktu cepat, dibanding menanam,” tegasnya.

Menurut Heru, dalam pembangunan pertanian nasional memang banyak yang keliru.


“Konsumsi kita yang mungkin berlebihan untuk produk-produk pangan tertentu. Memang, kalau kita tidak melakukan suatu perubahan maka suatu waktu ke depan kondisinya akan semakin parah, kebutuhan pangan meningkat sementara produksi pangan kita tidak banyak, sehingga mau tidak mau harus bergantung ke negara lain,” katanya.

Impor pangan, katanya, memang bagi segelintir orang menyukainya karena mereka mendapat untung dari kegiatan tersebut. Para pencari rente itulah yang terus-menerus membuat keberagutan pada negara lain.

“Ini sesuatu yang seharusnya membuat kita berubah, meningkatkan ketahanan pangan kita, berdaulat di bidang pangan agar negara kita bisa lebih mandiri,” pungkas Heru. ■ **ers/YK/E-9**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Pemerintah Pacu Perluasan Tanam	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Ers/E-10	

Kemandirian Pangan Pemerintah Pacu Perluasan Tanam

JAKARTA - Di tengah fenomena El Nino yang melanda, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) harus memastikan produksi padi tahun ini mencapai target yang ditetapkan, sebesar 54,5 juta ton.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino dengan melakukan penambahan tanam dengan target sebesar lebih dari 500 ribu hektar.


Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menjelaskan Gernas Penanganan Dampak El Nino yang menjadi salah satu program utama untuk menjaga produksi padi pada tahun ini. Kementan memiliki empat strategi utama dalam menghadapi dampak fenomena El Nino yaitu antisipasi dini, adaptasi, mitigasi dan kolaborasi.

“Langkah operasional untuk melaksanakan strategi itu adalah berupa Gernas Penanganan Dampak El Nino dilakukan dengan kegiatan tambah luas tanam lebih dari 500 ribu hektar di 10 provinsi dan 100 Kabupaten yang sudah dipetakan cocok dilakukan tambah tanam, perluasan areal tanam, dan percepatan tanam untuk meningkatkan indeks pertanaman. Progresnya terus kami monitor dengan melakukan koordinasi antara pusat dan daerah, serta terjun langsung ke lapangan,” jelas Suwandi pada saat kunjungan kerja di Merauke, Papua dikutip dari keterangannya, Kamis (5/10).

Sebagai informasi secara nasional realisasi Gernas untuk penambahan luas tanam realisasinya pada awal Oktober ini telah mencapai lebih dari 292 ribu hektar dan terus bertambah setiap harinya. Salah satu provinsi yang terlibat dalam Gernas adalah Jawa Barat.

Terpisah, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Yanti Hidayatun Zakiah mengungkapkan wilayahnya terus gencar meningkatkan realisasi tambah tanam untuk mencapai target gernas Jawa Barat. Realisasi Jawa Barat hingga 4 Oktober 2023 telah mencapai 25.187 Hektar.

“Terdapat 17 Kabupaten di Jawa Barat yang terlibat dan terus kami dorong realisasi tanamnya baik melalui program yang sudah ada ataupun melalui swadaya,” sebutnya. ■ **ers/E-10**

Title	Petani Milenial Apresiasi Keseriusan Gajar Wujudkan Ketahanan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	SB/E-9	

Program Kerja

Petani Milenial Apresiasi Keseriusan Ganjar Wujudkan Ketahanan Pangan

CIANJUR - Petani milenial mengagumi keseriusan bakal calon presiden RI, Ganjar Pranowo, dalam upayanya mewujudkan ketahanan pangan dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia.

Duta Petani Milenial, Sandi Oka Susila, mengaku banyak berdiskusi dengan Ganjar dan mendapat *insight* tentang ide dan gagasannya terkait pertanian dan ketahanan pangan.

"Kami petani milenial senang sekali bisa bertemu Pak Ganjar. Beliau memberikan harapan besar terutama di sektor pertanian ke depan," kata Sandi dalam keterangan yang diterima *Antara* di Surabaya, Kamis (5/10).

Pernyataan Sandi tersebut diutarakan se usai mendampingi Ganjar Pranowo berkunjung ke desanya di Tegallega, Cianjur, Jawa Barat, Kamis.

Saat mendampingi Ganjar, dia mendapat banyak bukti tentang keseriusan Ganjar, seperti menginisiasi pembangunan pabrik teh premium di Desa Tegallega dan melibatkan petani milenial serta memberdayakan petani lokal agar lebih sejahtera.

"Itu bagian dari program hilirisasi sektor pertanian yang beliau canangkan, dan kami anak muda diajak terlibat dalam program itu. Pak Ganjar memang benar-benar memiliki perhatian besar pada kesejahteraan petani," kata Sandi.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB (%)



Sumber: BPS - Litbang KJ/and

KORAN JAKARTA/ONES

Ganjar, lanjut Sandi, benar-benar serius dan fokus dalam pengembangan sektor pertanian demi terwujudnya ketahanan pangan. Ide dan gagasan Ganjar melompat ke depan tentang perencanaan yang sangat matang.

"Dan itu dimulai dari desa, sebagai penghasil pangan utama. Beliau datang dan melakukan pendampingan. Itu bukti kalau beliau benar-benar serius," katanya.

Seorang pemimpin, tambahnya, harus fokus pada ketahanan pangan karena sektor pertanian adalah persoalan yang berbicara tentang masalah kehidupan. Apalagi, saat ini kondisi pangan dunia mengkhawatirkan.


"Apa yang dilakukan Pak Ganjar sudah tepat. Tentu dengan program beliau, ketahanan pangan dan regenerasi petani milenial bisa terwujud. Tentu ini harapan dan angin segar bagi masa depan Indonesia," katanya.

Bakal capres 2024, Ganjar Pranowo, berkunjung ke Desa Tegallega Cianjur, Jawa Barat, dan menginap di kampung yang terletak di kaki Gunung Gede itu, pada Rabu (4/10). Ganjar memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

Masalah Mendasar

Pengamat politik sekaligus Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan perhatian Ganjar sebagai bacapres menunjukkan kepedulian terhadap masalah mendasar bangsa, yaitu kebutuhan pangan.

"Ini menunjukkan Ganjar memiliki kepedulian dan perhatian terhadap persoalan daulat dan ketahanan pangan. Apalagi situasi dunia juga sedang tidak baik-baik saja sehingga konteks dan relevansinya kian tinggi jika ada yang terus mengangkatnya. Ini memupuk harapan khususnya kepada generasi muda bahwa sektor ini penting untuk dijaga semua pihak dan selalu punya prospek baik di masa depan.

Title	BEEF Pacu Impor Sapi Tahun Depan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	10	
Author	Artha Adventy	

| STRATEGI EMITEN |

BEEF Pacu Impor Sapi Tahun Depan

Bisnis, JAKARTA— Emiten pengolahan daging, PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF) memacu impor sapi hidup tahun depan guna mengerek kinerja penjualan.

BEEF menargetkan impor sapi hidup sebanyak 15.000 ekor dari Australia sepanjang 2024 dengan nilai pembelian maksimal Rp20 juta per ekor.

Direktur Utama Estetika Tata Tiara Imam Subowo mengatakan target tersebut lebih tinggi dari izin yang diperoleh perusahaan pada 2023 dengan mendatangkan 12.000 ekor sapi.

“Untuk tahun depan target kami per bulan harus dapat menjual 1.000 sapi hidup, maka kami dapat mengimpor sapi hidup 1.000 ekor pula,”

katanya dalam paparan publik, Kamis (5/10).

Di tengah target impor yang lebih tinggi, perusahaan pun merancang siasat agar rencana perusahaan tak terhambat fluktuasi nilai tukar rupiah. Seperti diketahui, mengutip data *Bloomberg*, rupiah ditutup menguat 0,1% yakni mencapai Rp15.618 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS ikut turun 0,01% ke 106,78.

BEEF akan memanfaatkan kerja sama dengan eksportir untuk penetapan harga beli sapi.

“Sambil melihat nilai tukar rupiah, harus diantisipasi. Jadi strategi masih dalam pembahasan,” jelasnya.

Sementara itu, dari laporan keuangan semester I/2023 menunjukkan mayoritas pen-

dapatan berasal dari segmen distribusi dan penjualan yaitu sekitar Rp297,55 miliar dan segmen pengolahan makanan sebesar Rp4,78 miliar.


Total pendapatan BEEF tercatat sebesar Rp301,7 miliar atau naik signifikan secara tahunan dari Rp14,95 miliar.

Dengan pendapatan yang melambung tersebut, BEEF berhasil membalikkan rugi bersih tahun lalu sebesar Rp40,59 miliar menjadi laba bersih sebesar Rp52 miliar. Sementara itu, laba kotor tercatat sebesar Rp36,66 miliar dari sebelumnya laba sebesar Rp1,20 miliar.

Alhasil, ekuitas perusahaan pada tahun lalu masih tercatat negatif sebesar Rp266,28 miliar menjadi positif Rp135,39 miliar. (Artha Adventy)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Ekonomi Pada Tahun Politik	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	2	
Author	Irwan Wisanggeni	

Ekonomi Pada Tahun Politik

Saat ini, setiap negara mengalami perlambatan ekonomi. Penyebab perlambatan ekonomi yaitu belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina. Perang ini menghilangkan PDB global hingga US\$2,8 triliun. Fenomena geopolitik ini pun masih berlangsung.

Indonesia harus menelan pil pahit atas krisis yang menimpa dunia ditambah 2023 dan 2024 adalah tahun politik. Mengampanye baru akan dimulai pada bulan November 2023—awal Februari 2024, tetapi kegaduhan partai-partai sudah dimulai sejak awal 2023 sehubungan dengan pemilihan capres-cawapres yang selalu ramai diperbincangkan masyarakat.

Namun, fenomena anomali yang terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2023 sebesar 5,03%. Pencapaian kategori yang cukup tinggi di luar prediksi semua pihak, baik pemerintah maupun para ekonom. Apalagi, ekonomi global sedang mengalami tekanan dan perlambatan.

Neraca Perdagangan Indonesia juga mengalami surplus pada Januari—Juni 2023 akumulatif mencapai US\$19,93 miliar. Demikian juga dengan pendapatan negara hingga Juni 2023 mencapai Rp1.407,9 triliun atau 57,2% dari Target APBN 2023. Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif.

Apa penyebab ekonomi Indonesia tetap mengalami pertumbuhan secara makro dan masih akan terus mengalami peningkatan? Penulis melihat adanya fondasi yang kuat dengan hadirnya pengimplementasian dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi luar biasa saat ini.

Walaupun pertumbuhan makro ekonomi Indonesia mengalami stabilitas, tetapi kecenderungan pengusaha adalah *wait and see* dalam berinvestasi pada tahun politik ini. Memanasnya geopolitik dalam negeri akan membuat pengusaha berjaga-jaga jika terjadi kekacauan di tengah masyarakat saat kampanye pada pemilu mendatang. Fakta berbicara pada pemilu sebelumnya politik kebencian digunakan termasuk menggunakan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Selain itu, para pengusaha ingin kepastian dari siapa pemimpin Indonesia yang akan dipilih rakyat pada 2024 mendatang. Maka tahun politik berdampak pada melambatnya investasi dan ekspansi bisnis dari para investor luar dan dalam negeri.

Rakyat Indonesia tetap akan mengalami dua tekanan di tahun politik. *Pertama*, melambatnya perekonomian dikarenakan para pengusaha mengambil sikap *wait and see*. *Kedua*, adanya kegaduhan politik yang membuat situasi tidak kondusif.

Pemerintah perlu membuat mitigasi risiko untuk memperkuat bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi tentunya dengan jangkauan yang lebih komprehensif dan data yang lebih cermat terhadap masyarakat kecil (*wong cilik*) yang kena dampak ekonomi atas peristiwa di tahun politik ini. Harga pangan harus dijaga tetap murah, seperti harga beras yang saat ini terus naik. Harga beras telah mencapai Rp14.760 per kilogram, melonjak sekitar 17%. Padahal, lonjakan kenaikan harga pangan seharusnya tidak terjadi.

POLITIK EKONOMI
Kondisi tahun politik



IRWAN WISANGGENI
Dosen Magister Akuntansi
Universitas Trisakti

akan membuka peluang terhadap para politikus. Misalnya jika krisis terjadi, kejadian ini akan mendorong ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Kandidat politik pun dapat menjadikan isu ini sebagai modal untuk menjanjikan kondisi yang lebih baik jika mereka berkuasa.

Di sisi lain, jika krisis tidak terjadi di Indonesia, maka partai atau kandidat yang memiliki pengalaman berkuasa pada 2019—2024, akan menggunakan kebijakan-kebijakan yang telah mereka ambil di masa berkuasa sebagai bukti bahwa mereka mampu menangani krisis sehingga krisis tidak terjadi di Indonesia sementara di negara lain tetap terjadi.

Para politikus sangat paham sekali atas keterkaitan ekonomi dan politik karena jika mereka mainkan akan mendatangkan manfaat buat ketepingan politik mereka. Keterkaitan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Profesor Miriam Buidarjo Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang menjelaskan bahwa ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan yang telah ditentukan dan cara men-

capai tujuan yang telah ditentukan.

Ilmu ekonomi sangat *planning oriented* dan pengaruhnya meluas pada ilmu politik, seperti kaitannya dengan pembangunan ekonomi (*economic development*) yang telah memengaruhi pengertian pembangunan politik (*political development*). Dari teori ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ekonomi sangat berpengaruh pada politik dan ini akan dimanfaatkan para politikus pada tahun politik saat ini.


Menyangkut pandangan di atas bahwa isu ekonomi dapat dijadikan alat para politikus dalam strategi kampanyenya untuk menjadi magnet menyedot suara pemilih hal ini menjadi sah-sah saja dan dapat dituangkan dalam bentuk visi dan misi para partai politik dan para capres, cawapres.

Namun, apa yang perlu dilakukan pemerintah ditahun politik ini? Dalam bidang ekonomi pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih membuat investor merasa aman sehingga iklim investasi dapat terus bergulir walau melambat tetapi tetap jalan.

Semua ini berkaitan dengan langkah stabilitas keamanan pada saat kampanye dan saat pemilu sehingga tidak terjadi *chaos*, dengan melarang secara tegas semua bentuk kampanye hitam yang menggunakan isu SARA.

Semoga masyarakat tidak tertimpa kesulitan ekonomi yang parah di tahun politik ini.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga dilengkapi foto terbaru. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail redaksi@bisnis.com.

Title	JPFA Lincah Pacu Ekspor	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	13	
Author	Dionisio Damara	

| EMITEN UNGGAS |

JPFA Lincah Pacu Ekspor

Bisnis, JAKARTA — Emiten unggas, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) mendorong penjualan ke luar negeri dengan mengekspor telur tetas (*hatching egg*) indukan ayam broiler ke Brunei Darussalam.

Ekspor perdana *hatching egg* JPFA ke Brunei dilaksanakan pada Rabu (4/10) dengan mengekspor 45.000 butir telur tetas indukan ayam broiler ke Brunei Darussalam. Total ekspor diperkirakan mencapai 130.000 butir selama Oktober 2023.

Direktur Japfa Comfeed Harwanto menyampaikan pengiriman telur tetas tersebut bukanlah yang pertama kali karena perseroan sebelumnya telah mengekspor telur tetas ke Myanmar. Hal itu dinilai menjadi bukti bahwa produk perunggasan JPFA diminati pasar man-

canegara.

“Selain itu, ekspor yang kami lakukan ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung pemerintah dan industri perunggasan Indonesia untuk menjaga keseimbangan populasi ayam broiler di dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/10).

Harwanto menambahkan JPFA terus berupaya melebarkan sayapnya ke negara-negara Asia lain agar sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat laju ekspor nasional.

“Berikutnya, kami akan mengirimkan telur tetas ke Malaysia. Kami berharap negosiasi *government to government* antara kedua negara dapat berjalan dengan baik agar ke depannya kolaborasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.


Sebelumnya, JPFA melaksanakan ekspor perdana 23.000 ekor ayam hidup ke Singapura pada Mei 2023. Ayam hidup yang diekspor JPFA merupakan hasil budi daya anak usahanya, PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Ekspor tersebut dilakukan melalui laut dan merupakan opsi pengiriman baru untuk memasok ayam segar ke Singapura. Pada 2023, JPFA menargetkan volume ekspor ke Singapura mencapai 1.500 ton atau sekitar 900.000 ayam hidup.

Pada semester I/2023, JPFA mengantongi penjualan ekspor Rp422,33 miliar atau 1,74% dari total penjualan neto yang mencapai Rp24,15 triliun. Meski kontribusinya masih minim, penjualan ekspor JPFA tumbuh 15,44% secara tahunan. (*Dionisio Damara*)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	PACU INVESTASI UNTUK LAJU DIVERSIFIKASI	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	18	
Author	M Mutawallie Sya'rawie	

| TRANSFORMASI EKONOMI KALTIM |

PACU INVESTASI UNTUK LAJU DIVERSIFIKASI

Bisnis, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menjajaki kerja sama dengan investor Australia guna mendorong penghiliran di sektor energi hijau dan peternakan Benua Etam. Hal itu menjadi salah satu upaya Kaltim dalam menggebut transformasi ekonomi dari industri ekstraktif menuju sektor bernilai tambah dan berkelanjutan.

M Mutawallie Sya'rawie
mutawallie.syarawie@bisnis.com

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kaltim, Pughu Harjanto mengatakan pihaknya berupaya mengembangkan sektor-sektor baru di luar migas dan batu bara yang selama ini menjadi andalan provinsi.

Kaltim ingin memaksimalkan peluang di sektor-sektor yang memiliki potensi besar di Kaltim, terutama dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke wilayah tersebut.

"Kami ingin fokus pada sektor yang baru karena perhatian utama kami berada di luar sektor migas dan batu bara," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/10).

Menurutnya, sektor energi hijau dan peternakan menjadi pilihan utama karena Australia memiliki pengalaman yang cukup di bidang tersebut.

Selain itu, sektor-sektor ini juga dapat berkolaborasi dengan sektor-sektor lain seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

"Kami akan menjelajahi opsi ini, dan Australia memiliki pengalaman yang cukup dalam sektor peternakan. Prosesnya masih dalam tahap awal, dan kami mungkin akan menjadwalkan pertemuan langsung untuk membahas lebih lanjut," katanya.

Pughu menambahkan, pihaknya juga perlu mempertimbangkan target dan lokasi yang potensial agar sesuai dengan rencana pemerintah provinsi.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk pihak dari kabupaten/kota yang menjadi fokus perencanaan.

"Sepertinya kami akan lebih memfokuskan pada sektor energi hijau, karena ini telah menjadi perbincangan yang terus kami kembangkan sejak pertemuan kami

sebelumnya. Namun, kami juga berpikir bahwa sektor peternakan memiliki peluang yang bagus, terutama karena permintaan di Kaltim cukup tinggi," jelasnya.

Pughu mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah membuat profil investasi dan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Sejauh ini, kata Pughu, lokasi investasi yang mungkin disiapkannya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

"Kami akan melakukan pemetaan lebih lanjut untuk memahami tingkat kesiapan dan keseriusan mereka," ungkapnya.

Dia pun berharap kerja sama dengan investor Australia dapat direalisasikan menjelang akhir tahun ini.

Seperti diketahui, Pemprov Kaltim menargetkan sektor ekstraktif khususnya pertambangan, yang pada 2022 dominan dengan 53% sumbangsih bagi ekonomi Kaltim, hanya akan berkontribusi sebesar 17% pada 2030.

Sebaliknya, kontribusi sektor lain yang bernilai tambah dan berkelanjutan akan didorong. Industri pengolahan misalnya ditargetkan dapat berkontribusi hingga 42% bagi ekonomi Benua Etam pada 2030 atau meningkat signifikan dari 15% pada 2022.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang pada tahun lalu berkontribusi sebesar 5% bagi ekonomi regional diharapkan bisa berkembang dengan sumbangsih sebesar 20% dalam 7 tahun ke depan. Sektor pertanian pun didorong kontribusinya dari 7% pada 2022 menjadi 10% pada 2030.

Untuk memuluskan upaya transformasi ekonomi tersebut, Pemprov Kaltim mendorong peningkatan investasi ke industri pengolahan dan penghiliran.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Kaltim pada semester I/2023 mencapai Rp30,96

triliun atau mencapai 48,01% dari target sepanjang tahun, Rp64,5 triliun.

Jika diperinci, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kaltim pada periode tersebut mencapai Rp22,35 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp8,61 triliun.

Nilai penanaman modal itu terealisasi dari 8.175 proyek dengan total 26.614 tenaga kerja yang terserap. Dari jumlah tersebut, investasi di Kaltim menyerap 26.482 tenaga kerja Indonesia dan 132 tenaga kerja asing.

DAYA TARIK

Demi mewujudkan target itu, DPMPPTSP Kaltim terus berupaya meningkatkan daya tarik investasi di wilayahnya.

Pughu memerinci, upaya lain yang sedang dilakukan adalah menyusun rencana investasi atau *investment ready to offer* (IPRO) untuk 2 kabupaten, yaitu Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar). Menurutnya, IPRO merupakan salah satu strategi untuk menawarkan peluang investasi yang potensial dan siap dilaksanakan kepada calon investor.

"Kami berharap pada akhir tahun ini, akan ada lebih banyak IPRO yang siap ditawarkan. Ini menjadi sangat penting untuk menarik calon investor ke Kaltim," ujar Pughu.

Pughu menjelaskan, saat ini tim konsultan sedang melakukan kajian untuk menentukan sektor-sektor utama yang akan dijadikan IPRO di Mahulu dan Kubar. Hasil kajian tersebut diperkirakan akan selesai pada bulan November mendatang.

"Kami memiliki target akhir tahun ini, dan tahun depan kami akan mempersiapkan beberapa rencana IPRO lagi. Kami juga menerima rencana investasi dari Kementerian Investasi," tambahnya. Pughu mengatakan, IPRO yang



Kami berharap pada akhir tahun ini, akan ada lebih banyak IPRO yang siap ditawarkan. Ini menjadi sangat penting untuk menarik calon investor ke Kaltim.

dibuat berlandaskan rencana mendorong ekonomi berkelanjutan di Benua Etam, termasuk *green economy* dan *blue economy*.

Selain itu, DPMPPTSP Kaltim juga akan mempercepat proses penghiliran sektor pertambangan dan smelter.

"Saat ini, kami sedang mengupayakan proses-proses hilir dalam sektor pertambangan," katanya.

Selain IPRO dan penghiliran, DPMPPTSP Kaltim juga sedang fokus pada pengembangan kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta koperasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dampak positif dari investasi tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga oleh masyarakat di sekitarnya.

"Kami sedang merancang pendekatan geospasial untuk ini dan *pilot project* kami berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun depan, kami akan menambahkan 4 lokasi lainnya di berbagai kabupaten dan kota," ungkap Pughu.

Pughu menambahkan, DPMPPTSP Kaltim akan terus mengevaluasi dampak positif investasi terhadap pengembangan makroekonomi dan penguatan sektor UMKM. Hal itu juga

sejalan dengan program Kementerian UKM dan Koperasi.

Adapun, dia berharap pada tahun 2025, seluruh wilayah akan menerapkan kemitraan ini dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang lebih baik.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando sebelumnya mengatakan Benua Etam telah berada pada koridor yang tepat terkait transformasi ekonomi dari industri ekstraktif yang tidak terbarukan menuju sektor yang bernilai tambah dan berkelanjutan.

Menurutnya, salah satu faktor yang dapat mempercepat upaya transformasi ekonomi Kaltim adalah hadirnya IKN Nusantara di Pulau Borneo.

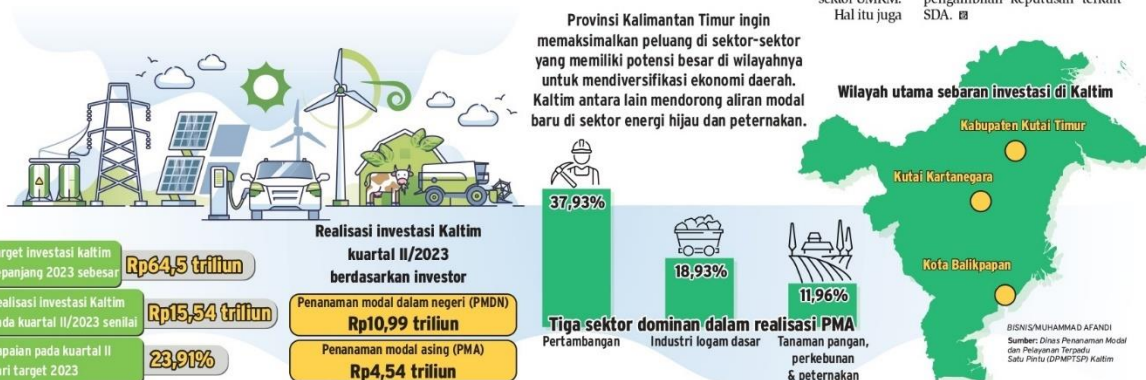
"Kami berharap IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan kreativitas. Dengan demikian, IKN dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di Kaltim dan Kalimantan secara keseluruhan," tuturnya.

Untuk mendukung pembangunan IKN dan wilayah mitra, Yusliando mengatakan Pemprov Kaltim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan terus meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerahnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi mendukung upaya transformasi ekonomi di Kaltim menuju sektor yang berkelanjutan, seperti pertanian dan pariwisata. Namun, dia menilai upaya itu juga sangat memerlukan dukungan pemerintah pusat.

"Kebijakan *omnibus law* yang diterapkan oleh pemerintah pusat dinilai tidak memberdayakan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA)," katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat harus memberikan ruang bagi daerah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait SDA. ■



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERAN

Title	PEMBATASAN BELI, IRONI DI NEGERI LUMBUNG PADI	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	17	
Author	Dwi Rachmawati	



PEMBATASAN BELI, IRONI DI NEGERI LUMBUNG PADI

Indonesia yang dikenal sebagai salah satu Negeri Lumbung Padi di Asia Tenggara justru membuat kebijakan untuk membatasi pembelian beras.

Dwi Rachmawati
redaksi@bisnis.com

Seakan tidak cukup dengan harga yang terus naik gila-gilaan, kini pembelian beras di ritel modern juga harus dibatasi. Baru-baru ini, sejumlah ritel modern mulai memberlakukan pembatasan itu, seperti hasil pantauan *Bisnis* di gerai Super Indo wilayah Bogor, Selasa (3/10). Setiap konsumen hanya bisa membeli 2 pak beras per hari.

Kebijakan tersebut juga berlaku untuk semua merek beras premium yang dijual di gerai tersebut—yang mulanya berasal dari kemitraan antara Salim Group, Indonesia dan Ahold Delhaize, Belanda. Harga beras kualitas premium berkisar Rp69.000—72.000 untuk kemasan 5 kg, sehingga harga per kg mencapai Rp13.800—14.400. Berdasarkan informasi yang dihimpun *Bisnis*, kebijakan pembatasan ini berlaku sejak 2 pekan lalu atau bertepatan dengan tren kenaikan harga beras pada pertengahan September 2023. Kebijakan pembatasan tersebut dibenarkan oleh Ketua

Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey. Keputusan itu dilakukan sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas), demi pemerataan distribusi beras ke konsumen.

“Jadi justru [pembatasan] itu merupakan arahan pemerintah,” kata Roy, Selasa (3/10). Bukan hanya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari pemerintah, Roy mengakui bahwa pembatasan pembelian dipukul rata untuk semua jenis beras, termasuk beras premium. Peritel membatasi pembelian beras maksimal 2 pak per konsumen per hari.

Pembatasan itu dilakukan seiring dengan pasokan beras yang makin tipis akibat adanya kekeringan panjang di sejumlah wilayah. Harga gabah yang naik drastis juga mendorong produsen beras premium untuk menaikkan harga. “Jumlah [beras] premium juga terkendala dengan adanya pasokan yang berkurang,” ujarnya.

Roy menuturkan bahwa kenaikan harga beras premium di produsen menjadi kendala

para ritel dalam pengadaan stok. Sebagian beras yang dijual saat ini merupakan stok sebelumnya yang masih menggunakan harga lama.

Pembatasan pembelian dilakukan untuk pemerataan dan mencegah aksi penimbunan di masyarakat. Kendati demikian, dia memastikan kelangkaan beras tidak akan terjadi, meskipun stok tidak bisa dibalang banyak maupun terlalu tipis. Adapun, pembatasan pembelian tersebut bakal berlangsung hingga pasokan beras kembali melimpah dan harga kembali normal.

“Stoknya tersedia, masyarakat jangan panik. Saya sih enggak yakin akan langka, tetap optimistis,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membenarkan adanya pembatasan beras, tetapi lebih dikhususkan untuk pembelian beras SPHP yang digelontorkan Bulog.

“Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pak di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel



Dirut Bulog Budi Waseso (kdua kiri) dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri) berdialog dengan pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jakarta.

masing-masing,” kata Arief, Selasa (3/10).

Dia pun menegaskan bahwa beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Penyaluran beras SPHP hingga ke ritel modern pun, merupakan instruksi Presiden Jokowi agar intervensi harga beras dilakukan secara masif.

Di sisi lain, Arief menjelaskan pembatasan pembelian beras SPHP di ritel modern menjadi upaya untuk mendorong masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan, alih-alih *panic buying*.

SINYAL KELANGKAAN

Secara terpisah, Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar) Syaiful Bahari menilai pembatasan pembelian beras di ritel modern merupakan indikasi pasokan yang makin sekarat. Bahkan, terdapat pabrik besar yang berhenti produksi di tengah lonjakan harga gabah yang makin menggila.

“Ya, pasti akan terjadi kelangkaan beras karena barangnya memang sudah makin berkurang,” ujar Syaiful saat dihubungi, Selasa (3/10).

Dia memperkirakan produksi gabah hingga panen raya pada kuartal 1/2024 akan tetap kurang dan harganya mahal. Saat ini, harga gabah yang sudah di atas Rp7.000 per kilogram telah membuat produsen beras

“Pembatasan pembelian tersebut bakal berlangsung hingga pasokan beras kembali melimpah dan harga kembali normal.**”**


berpikir ulang untuk memproduksi, daripada merugi.

Penan raya menjadi penentu nasib perberasan nasional, alih-alih hasilnya tidak sesuai target dipastikan Indonesia perlu mengimpor beras lebih dari 1 juta ton lagi di tahun depan. Namun, importasi beras pada tahun depan pun, kata dia, juga amat bergantung dari situasi pasar global.

“Apakah [sumber impor] tetap tertutup atau mulai terbuka,” tutur Syaiful. □



Petani memanen padi di Nagreg, Jawa Barat.

Title	PERUM BULOG BUKA OPSI PINJAMAN PERBANKAN	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	5	
Author	Annasa Rizki Kamalina & Dwi Rachmawati	

IMPOR BERAS |

PERUM BULOG BUKA OPSI PINJAMAN PERBANKAN

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum Bulog membuka opsi pinjaman perbankan untuk membiayai impor pangan berupa beras sebanyak 1,5 juta ton dari China, sebagai dampak dari penurunan produksi akibat fenomena El Nino.

Annasa Rizki Kamalina & Dwi Rachmawati
redaksi@bisnis.com

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyampaikan opsi pinjaman itu menggunakan skema yang sama dalam pemenuhan cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam negeri sesuai aturan pemerintah. Sejauh ini, Kementerian Keuangan telah mengatur skema pinjaman dengan insentif bunga guna mendukung pemenuhan CPP dalam negeri, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/2023 yang ditandatangani Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 15 September 2023. Skema itu dilakukan melalui kredit, salah satunya dari Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk memenuhi CPP tersebut. "Kalau penugasan sama dengan skema penugasan dalam negeri," katanya kepada *Bisnis*, Kamis (5/10).

Pendanaan Bulog dari cash yang mereka punya dan Himbara.

Saat ini, Perum Bulog telah menajaki potensi impor beras apabila kuota tambahan diperlukan di akhir tahun, salah satunya dari China. Namun, dia belum menjelaskan berapa harga beras impor asal Negeri Panda itu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa anggaran untuk pemenuhan CPP tersebut akan berasal dari dana milik Perum Bulog dan pinjaman perbankan. "Pendanaan Bulog dari *cash* yang mereka punya dan Himbara," kata Arief.

Dia menyampaikan, opsi impor beras hingga 1,5 juta ton dilakukan seiring dengan produksi beras yang mengalami defisit hingga akhir tahun ini.

"Setelah November, 1,5 juta ton [impor], pokoknya apapun kami kerjakan. Kalau memang kurang, kenapa enggak? Pilih mana, punya stok atau tidak punya stok," kata Arief.

Menurutnya, impor beras akan dilakukan secukupnya untuk kebutuhan cadangan pemerintah dan stabilisasi harga. Saat ini, penyerapan dari petani mulai sulit dilakukan Perum Bulog lantaran harga yang sudah terlalu tinggi.

Pada Rabu (4/10), Bapanas menyatakan sebanyak 27.000 ton beras impor asal Vitenam tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Arief Adi mengatakan, bongkar muat beras impor tersebut membutuhkan waktu hingga 6 hari. Adapun, beras impor yang baru tiba itu merupakan bagian dari penugasan impor beras 2 juta ton kepada Bulog yang diperkirakan rampung seluruhnya pada November 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar stok cadangan beras pemerintah (CBP) terus ditambah dan tidak boleh

kurang dari 1 juta ton.

"Bahkan diminta terus ditingkatkan hingga 1,5 samlai 2 juta ton. Stok Bulog hari ini *secured* di 1,7 juta ton," kata Arief.

Oleh karena itu, Arief mengelak-laim bahwa stok beras nasional yang dimiliki pemerintah tersedia dan cukup. Dia meminta masyarakat tetap tenang menghadapi krisis harga beras seperti saat ini. Alasannya, penurunan harga beras bakal terjadi secara bertahap seiring dengan program yang dijalankan pemerintah.

Arief menuturkan, mulai ada depresiasi harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pas-penggelontoran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak pertengahan September 2023.

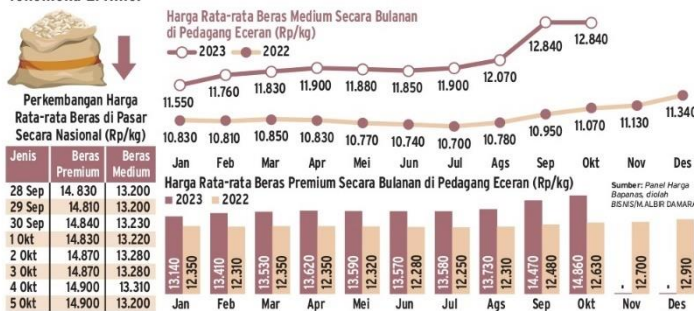
Dia memastikan pada pasar turunan PIBC juga telah disalurkan beras SPHP. "Perintah Bapak Presiden agar stok di PIBC bisa di 35.000 ton, hari ini stok beras sudah 31.000 ton. Bulog sudah penuh ke PIBC lebih dari 5.000 ton dari *Purchase Order* sebanyak 8.000 ton," ucapnya.

Berdasarkan data Panel Harga Bapanas pada Kamis (5/10), harga beras premium sempat menembus Rp15.120 per kilogram, atau naik 1,48% dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Untuk jenis beras medium, meski mulai bergerak turun, harganya masih di atas Rp13.000 per kilogram, tepatnya Rp13.210 per kilogram.

Angka tersebut kian menjauhi harga eceran

Opsi impor beras makin mengemuka setelah harga beras terus mengalami kenaikan sebagai imbas beberapa daerah penghasil gabah mulai mengalami penurunan volume panen akibat fenomena El Nino.



tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Perbadan No. 7/2023 yakni sebesar Rp10.900—Rp11.800 per kilogram untuk beras medium, dan Rp13.900—Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

MULAI TURUN

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadhi Wiraryo menjelaskan, harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mulai turun seiring dengan digelontorkannya CBP.

Pada saat pertama kali beras SPHP diguyur ke PIBC pada 13 September 2023, harga beras masih di kisaran Rp12.675 per kilogram dengan stok 25.394 ton.

Setelah 31.000 ton beras SPHP

masuk ke PIBC, imbuhnya, harga beras pada 2 Oktober 2023 turun 11% menjadi Rp11.185 per kilogram. Adapun, stok beras di PIBC saat ini telah mencapai 31.410 ton.

"Nah saat ini fokus kita adalah bagaimana kita melakukan penyaluran sampai ke *downline-downline* atau pengecer, dengan harapan pengecer semua atau masyarakat akan mendapatkan harga yang murah," ujar Pamrihadhi, Rabu (4/10).

Pemerintah menargetkan terjadi penurunan harga beras medium di PIBC hingga ke level harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kilogram. Adapun, harga jual beras SPHP di PIBC ditetapkan sebesar Rp10.385 per kilogram.

Harga beras dari Bulog sebesar

Rp9.950 per kilogram. Dengan harga jual beras SPHP di bawah HET beras medium, maka diharap harga beras yang terbentuk di pengecer bisa sesuai HET.

Saat ini, Pamrihadhi menyebut ada 116 pedagang PIBC yang menyalurkan beras SPHP. Sementara itu, jumlah toko pengecer beras SPHP di wilayah Jakarta ada 159 toko rekanan pedagang PIBC, dan 49 toko ritel mitra *Food Station*.


"Minggu ini kami targetkan kami mulai untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bekerja sama dengan dinas setempat dengan bupati dan wali kota setempat agar beras SPHP ini bukan hanya dinikmati oleh warga Jakarta saja," tuturnya. ■

Title	CEK STOK BERAS	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	9	
Author	Antarafoto/Fauzan/Spt	



ANTARA FOTO/Fauzan/Spt

CEK STOK BERAS:
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kedua kiri) bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo (kedua kanan) dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kiri) meninjau harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Rabu (4/10). Kunjungan itu dalam rangka peninjauan stok beras, Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekaligus pengecekan harga beras di PIBC.


Title	Ekspor Getah Pinus Asal Gowa Tembus 4 Negara	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	9	
Author	Rakyat Merdeka	

Ekspor Getah Pinus Asal Gowa Tembus 4 Negara

BERBAGAI produk unggulan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sudah menembus pasar dunia. Salah satunya getah pinus. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa Hamriani Hamzah mengatakan, getah pinus sukses diekspor ke India, Rusia, China dan Malaysia.

Selain getah pinus, produk unggulan lain asal Gowa, yakni telur ikan layang, kopi luwak dan ikan asap, juga sudah tembus pasar ekspor.

Telur ikan layang dari Kecamatan Bontomarannu diekspor ke China dan Taiwan. Kopi luwak dari Kecamatan Tinggimoncong diekspor ke Singapura dan Hong Kong, serta ikan asap dari Kecamatan Barombong diekspor langsung ke Peru.

Title	Petani Curhat Butuh Pompa	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	KAL	

Komisi IV Kunker Ke Merauke

Petani Curhat Butuh Pompa

ROMBONGAN Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kemarin. Di sana, para legislator melakukan panen padi dan berdialog langsung dengan para petani dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Utama Mandiri di Kampung Waningapmiraf, Distrik Tanah Miring.

“Kunjungan kerja reses ini untuk memastikan progres pengembangan pangan dan pertanian di Kabupaten Merauke, termasuk jumlah stok beras yang dimiliki Bulog di sini,” kata pimpinan rombongan Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan Budhy di Merauke, kemarin.

Komisi IV bersama Pemerintah Daerah dan para petani melakukan panen padi dengan *combine harvester* pada areal padi dengan varietas inpari 36.

Adapun produktivitas petani di Merauke ini rata-rata menghasilkan sekitar 4 ton beras per hektare dengan biaya produksi sekitar Rp 10 juta per hektare dengan harga jual beras saat ini mencapai Rp 11.000 per kilogram.

Petani Merauke tidak menjual gabah, tetapi menjual dalam bentuk beras. Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional pengembangan pangan.

Adapun Indeks Pertanaman (IP) di kabupaten yang baru dimekarkan ini adalah IP2 yakni rata-rata melakukan ta-

nam dan panen setahun 2 kali.

Budhy menilai, situasi pertanian di kawasan ini cukup baik. Dia pun memberikan apresiasi kepada para petani Gapoktan Utama Mandiri yang terus bekerja di sawah meskipun harus menghadapi beberapa kesulitan.

Adapun kendala yang dihadapi, salah satunya terkait dukungan pompa air.

“Tadi saya mendapat laporan di sini saat musim kemarau pengairannya membutuhkan pompa, dan saat musim hujan pun membutuhkan pompa karena saluran airnya berada di bawah lahan sawah,” ungkap Budhy.

“Jadi proses pengairannya dua kali dari sungai ke saluran lalu dari saluran ke lahan. Saya apresiasi para petani dan jajaran Pemerintah terkait yang terus bekerja di tengah kesulitan yang ada,” tambahnya.


Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menambahkan, luas baku sawah Kabupaten Merauke 32 ribu hektare dengan frekuensi tanam dua kali dalam setahun.

Adapun luas tanam sebanyak 64 ribu hektare dan produksi beras pada periode Januari-November ini diprediksi mencapai 115 ribu ton.

“Ini luar biasa. Merauke salah satu lumbung pangan berproduksi 115 ribu ton beras, sedangkan kebutuhan konsumsi di sini tidak sampai 15 ribu ton per tahun,” katanya. ■ KAL

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Wamen LHK Pernah Dimarahi, Dicekik Hoax	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 1	
Author	MEN	

Soal Isu Menteri Menampar Wamen LHK Pernah Dimarahin, Dicekik Hoax

WAKIL Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong buka suara soal isu dirinya ditampar dan dicekik oleh seorang menteri. Menurut dia, kabar tersebut hoax. Namun, dia mengakui, pernah dimarahi seorang menteri.

Satu persatu, wakil menteri yang diisukan ditampar dan dicekik oleh seorang menteri buka suara. Setelah Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasbul Qolbi, kemarin giliran Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong

yang memastikan isu tersebut hoax.

Wamen Alue Dohong membantah isu tersebut di akun Twitter X pribadinya, *@a_dohong*, Rabu (4/10/2023). Ada tiga cuitan yang dibuatnya.

"Sehubungan banyak pertanyaan, isu dan penafsiran bahwa seolah-olah diduga saya pernah mengalami kekerasan fisik (ditampar dan dicekik) dalam rapat terkait *food estate*, saya menyatakan dengan tegas bahwa "TIDAK PERNAH" atau "TIDAK ADA ada kejadian tersebut," tulisnya. Seandainya peristiwa kekerasan

tersebut terjadi, sebagai orang Dayak, dirinya tidak pernah membiarkan siapa pun melakukan hal tersebut. "Berita tsb kategori "HOAX", tidak saja merugikan pihak yang diduga



LEBIH
LENGKAP
BERITA
WAMEN LHK
SCAN QR
CODE INI

pelaku, tetapi juga sedikit merendahkan harkat dan martabat saya seolah-olah membiarkan orang untuk menganiaya saya seenaknya," tegasnya.


Namun, dia mengakui, pernah mendapatkan penganiayaan verbal dimarahi seorang menteri, tapi, dia menganggap itu karena miskomunikasi saja.

"Apalagi, setelah dijelaskan yang bersangkutan minta maaf ke saya, bahkan sampai tiga kali minta maafnya. Sekali lagi tidak ada kekerasan fisik alias hoax itu," ujarnya.

Isu soal seorang menteri menampar dan mencekik seorang wakil menteri pertama kali disampaikan Alifurrahman dari *SwordTV*. Dia menarasikan, menteri tersebut menampar dan mencekik seorang wamen saat rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Isu itu pun ramai di dunia nyata dan media sosial. Presiden Jokowi pun turun tangan meredamnya. Jokowi menegaskan tak ada kejadian

◆ BERSAMBUNG KE HAL 7

Title	Wamen LHK Pernah Dimarahi, Dicekik Hoax	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 2	
Author	MEN	

Dua Wamen Bantah Isu Menteri Nampar Dan Nyekik

Wamen LHK Pernah

... DARI HALAMAN 1

menteri mencekik wamen. "Setahu saya


tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek," kata Jokowi di Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).

Ia menyebut, banyak berita hoax di

tahun-tahun politik Jokowi pun meminta masyarakat terlebih dahulu mencari kebenaran dari setiap isu yang beredar di ruang publik atau media sosial.

Netizen yang mendengar penje-

lasan Alue Dohong juga terkejut. "Astaghfirullah. Terus untuk orang-orang yang membuat video dan menyebarkan hoax itu, apakah sudah diproses hukum mas?" tanya @ariefbudiawan7. ■ MEN

Title	Bapanas Tidak Akan Hapus HET Beras	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	13	
Author	TI	

Bapanas Tidak Akan Hapus HET Beras

JAKARTA, ID—Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) tidak akan menghapus kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras, seperti direkomendasikan Ombudsman RI. HET penting diberlakukan sebagai indikator penentu kebijakan stabilisasi harga beras bagi pemerintah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan, HET beras mempunyai peran penting sebagai indikator bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan stabilisasi pangan,

khususnya beras. Sebelumnya, Ombudsman RI memberikan rekomendasi kepada Bapanas supaya menghapus HET beras karena dinilai tidak efektif menjaga stabilisasi harga beras. "Bagaimana mungkin dihapus, HET beras atau komoditas lainnya penting karena itulah yang menjadi indikator pemerintah selama ini dalam mengambil kebijakan pangan," kata Arief saat meninjau ketersediaan pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta, baru-baru ini.

Pemerintah sangat berhati-hati dan menghitung rinci mulai dari pemetaan berapa biaya produksi petani hingga daya keterjangkauan masyarakat tiap daerah sebelum memberlakukan HET beras. Saat ini, HET diberlakukan untuk beras medium dan premium dengan besaran berdasarkan tiga zonasi wilayah. Menurut Arief, seperti dilansir *Antara*, ketika harga beras di daerah naik di atas harga eceran tersebut, untuk menstabilkannya pemerintah langsung melakukan beberapa

program bantuan pangan. "Contoh seperti yang dilakukan Perum Bulog, menyiapkan pasokan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan)," kata dia.

Perum Bulog saat ini menguasai stok sebanyak 1,7 juta ton dan ditargetkan menjadi 2 juta ton pada November 2023. Perum Bulog secara khusus telah menyalurkan 31 ribu ton beras melalui kegiatan SPHP (beras SPHP) ke PIBC dan itu efektif menurunkan harga beras medium hingga rata-rata menjadi Rp

11 ribu per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 12 ribu per kg. Arief mengajak semua pihak memahami bahwa tidak mudah menstabilkan harga beras di tengah kondisi kekeringan ekstrem akibat dampak El-Nino di Tanah Air. "Semua ini bagian dari komitmen pemerintah, selain menetapkan HET beras, pemerintah juga telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani hingga 20%, dari semula Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per

kg," jelas dia.

Secara rinci, zona I (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi) berlaku HET beras medium Rp 10.900 per kg dan premium Rp 13.900 per kg, zona II (Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan) berlaku HET beras medium Rp 11.500 per kg dan premium Rp 14.400 per kg, dan zona III (Maluku dan Papua) berlaku HET beras medium Rp 11.800 per kg dan premium Rp 14.800 per kg. **(ti)**


Title	Nilai Tukar Petani Naik
Date	6 Oktober 2023
Media	Investor Daily
Page	5
Author	Antara



Nilai Tukar Petani Naik

Petani menata tomat dalam keranjang saat panen di Desa Paron, Kediri, Jawa Timur, Kamis (5/10/2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2023 sebesar 114,14 persen atau naik 2,05 persen dibanding NTP bulan sebelumnya.

Antara

Title	Wapres Pastikan Program di Kementan Tetap Jalan	
Date	6 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	13	
Author	TI	

Wapres Pastikan Program di Kementan Tetap Jalan


JAKARTA, ID—Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memastikan program-program pertanian di Kementerian Pertanian (Kementan) tetap berjalan. Kasus hukum yang menimpa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak akan mengganggu program-program di kementerian tersebut. "Saya kira tidak (terganggu). Dan ada Wamentan, ada gubernur di daerah yang sudah siap juga, dirjen teknis, menurut saya, program pertanian tidak akan terganggu," ujar Wapres usai meresmikan dan melakukan penanaman perdana di Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada 4 Oktober 2023, seperti dikutip dari situs resmi Wapres, Kamis (05/10/2023).

Menurut Wapres, program di Kementan sudah jelas, seperti langkah-langkah apa yang dilakukan dan varietas mana yang digunakan, terutama dalam rangka menghadapi El Nino. Selain itu, sudah disiapkan sekian area yang harus ditanami. "Pertama, kan programnya sudah jelas. (Program) Ke depan itu sudah baik, langkah-langkah intensifikasi, mekanisasi, ekspansi, untuk memperluas lagi, itu sudah terprogram dengan baik," tutur Wapres. Wapres meyakini bahwa Wamentan Harvick Hasnul Qolbi bersama para pejabat teknis di Kementan mampu mengeksekusi rencana-rencana

penanganan pertanian yang telah disiapkan pemerintah. Ketika ditanya *reshuffle*, Wapres menjawab bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif Presiden.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo sebelum menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai menteri kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat memerintahkan kepada staf dan jajaran Kementan untuk menyelesaikan semua program kerja yang sedang bergulir maupun masih dalam perencanaan di kementerian itu. "Hanya membahas program saja, semua harus tercapai," ujar Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Inti Pertiwi Nashari terkait pertemuan singkatnya dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung A Kantor Kementan, Kamis (05/10/2023) pagi.

Menurut dia, seperti dilansir *Antara*, semua staf ahli menteri dan jajaran di Kementan hadir untuk mendengarkan penyampaian Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuan singkat yang berlangsung sekitar satu jam. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tiba di kantornya pukul 09.41 WIB. Ketika ditanya apakah dalam pertemuan itu juga membahas nama pengganti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Inti menyatakan tidak ada pembahasan itu. **(tl)**

Title	Perketat Pengawasan Distribusi Beras Bulog	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	1 Part 1	
Author	Agf/idr/syn/wan/elo/dho/c19/fal	

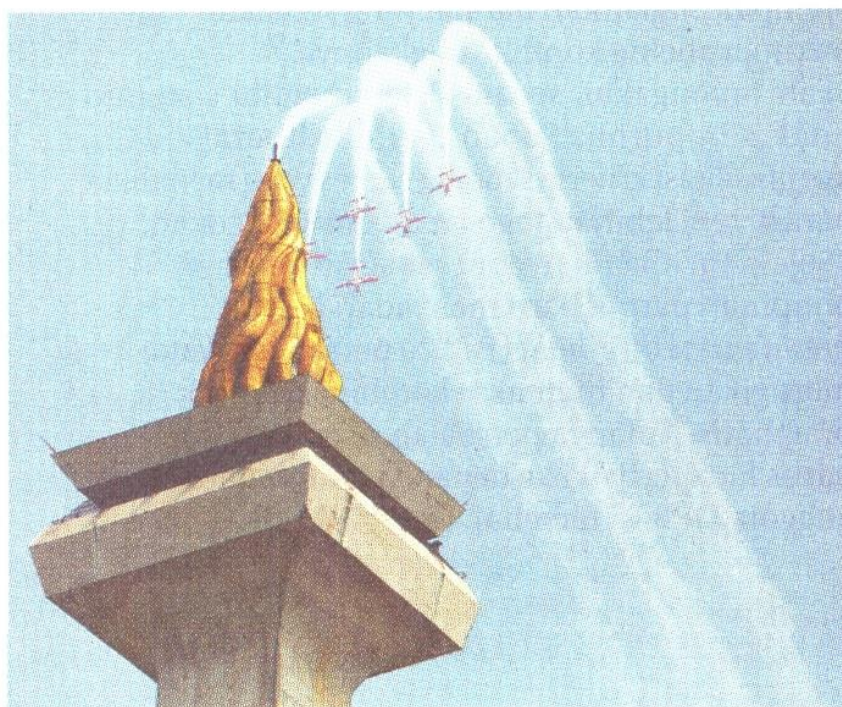
Perketat Pengawasan Distribusi Beras Bulog

Pembatasan Pembelian Tak Picu Panic Buying

JAKARTA - Pengawasan distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bakal diperketat. Sebab, ada tengara praktik kecurangan oleh oknum yang berupaya mengambil keuntungan sehingga harga beras tak kunjung turun.


Ada beberapa temuan di lapangan. Misalnya, pengoplosan beras Bulog ❖

*Baca **Perketat...** Hal 7*



FEDRIK TARIGAN/JAWA POS

PATRIOT NKRI: Atraksi pesawat dalam HUT Ke-78 TNI di Jakarta kemarin. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi meminta TNI peka persoalan pangan.

Title	Perketat Pengawasan Distribusi Beras Bulog	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	1 Part 2	
Author	Agf/idr/syn/wan/elo/dho/c19/fal	

Perketat Pengawasan Distribusi Beras Bulog

Sambungan dari hal 1

Selain itu, mengganti kemasan beras Bulog dengan karung beras merek lokal premium. "Beras Bulog dimasukkan ke *packaging* merek-merek mereka untuk disuplai dan dijual dengan harga tinggi premium," beber Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso kemarin (5/10).

Bulog akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Menurut Buwas, demikian Budi Waseso biasa disapa, pelaku bisa dijerat pidana kasus penipuan dan penyalahgunaan beras milik negara. "Indikasi penyimpanan itu selalu ada karena ada peluang atau kesempatannya," katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut menegaskan, distribusi beras SPHP akan berjalan seiringan dengan pengawasan dan penegakan hukum. "Kita libatkan semua satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," ujar Erick.

Mengenai potensi kecurangan, Erick menegaskan bahwa data produksi dan impor beras Indonesia harus satu data. Jika berjalan sendiri-sendiri, hal itu akan menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan. "Jadi, kami ingin mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data. Kasihan rakyat, kasihan petani. Pemainnya nanti begitu-begitu saja, selalu ingin cari uang cepat. Nah, ini harus diberantas," tegas Erick.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri berupaya membantu pemerintah mengecek stok, distribusinya, hingga harga beras. Hasilnya, sejumlah daerah diketahui masih berhasil panen raya. Salah satunya di Kalimantan Selatan. Kondisi itu memungkinkan untuk mengisi kekurangan stok beras.

Selain itu, menurut Kasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan, pihaknya sedang memantau kemungkinan terjadinya pidana terkait ulah oknum yang mengganti kemasan beras medium menjadi premium. Satgas pangan di

daerah dikerahkan untuk mendeteksinya. "Pernah kasus semacam itu terjadi di Bogor dan Bekasi. Masyarakat rugi karena beli harga premium, tapi mendapat yang medium," urainya.

Di sisi lain, pembatasan pembelian beras 10 kilogram per hari di ritel modern belum sampai memicu terjadinya *panic buying*. Di Surabaya, misalnya. Di salah satu gerai Alfamart di kawasan selatan Kota Pahlawan, memang ada sedikit kenaikan pembelian beras. Rata-rata konsumen membeli tidak hanya satu pak atau 5 kilogram beras. Ada yang membeli dua hingga tiga pak.

Dari pantauan *Jawa Pos*, pada label harga tertulis pembelian maksimal lima untuk setiap struk. "Memang ada kenaikan dibandingkan biasanya. Tapi, di sini masih bebas beli berapa pun meski belum ada yang sampai empat pak," ucap Faisal Hadi Mustofa, salah seorang pegawai.

Sementara itu, Kepala Pasar Wonokromo Masrur Faisal Muaji menuturkan, adanya kebijakan pembelian beras tersebut tidak terlalu memengaruhi tingkat pembelian di pasar tradisional. Meski begitu, ada masyarakat yang sempat *panic buying*. Namun, pihaknya telah menyosialisasikan kepada pedagang agar tak menjual lebih dari 10 kilogram. Menurut dia, itu dilakukan agar stok saat ini mencukupi bagi semua kalangan.

Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bulog Jawa Timur Erwin Tora mengklaim pasokan beras masih aman. Yaitu, mencapai 300 ribu ton. Selain untuk wilayah Jawa Timur, pasokan beras didistribusikan ke wilayah lain. Misalnya, Kalimantan, Papua, Maluku, dan Sulawesi.

Meski begitu, masyarakat diminta untuk membeli beras sesuai dengan kebutuhan sehingga pendistribusian beras dapat merata. "Untuk di Surabaya, dalam seminggu, satu atau dua kali beras kami distribusikan ke beberapa pasar tradisional. Yaitu, Pasar Wonokromo, Pucang Anom, Genteng, Tambakrejo, Soponyono, dan Keputran," kata Erwin.

Terpisah, pakar kebijakan agribisnis Departemen Agri-

bisnis IPB Feryanto tidak melihat adanya potensi *panic buying* akibat stok beras di Indonesia. Menurut dia, ketersediaan beras relatif masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Walaupun dengan kenaikan harga karena panen terganggu," katanya.

Dia mengatakan, masyarakat menengah ke atas dapat mengalihkan ke beras medium dan premium lainnya. Yang perlu dijaga pemerintah adalah masyarakat miskin. Caranya, memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin.

Sementara itu, dalam amanatnya saat peringatan HUT Ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta, kemarin, Presiden Joko Widodo menitipkan beberapa pesan untuk TNI. Di antaranya, seluruh jajaran TNI harus peka terhadap persoalan pangan yang kini sudah menjadi masalah global. "Karena urusan pangan adalah urusan perut. Sangat penting dan penentu stabilitas bangsa," ungkap Jokowi.

Saat ini krisis pangan sudah terjadi di banyak negara. Menurut Jokowi, salah satu penyebab munculnya krisis pangan adalah perubahan iklim dan terganggunya rantai pasok dunia. Akibatnya, 22 negara kini membatasi ekspor pangan, bahkan ada yang menghentikan ekspor pangan. Karena itu, presiden mengingatkan TNI untuk peka terhadap persoalan pangan sehingga Indonesia bisa melalui krisis tersebut.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti pesan yang disampaikan presiden. Menurut dia, sudah ada program terkait pangan.

Saat ini TNI punya Gerakan Nasional Ketahanan Pangan. Program itu berjalan di seluruh jajaran, baik di TNI-AD, TNI-AL, maupun TNI-AU. Mereka memanfaatkan lahan-lahan tidur atau lahan milik TNI yang masih kosong.

Dalam waktu dekat, lanjut Yudo, gerakan itu dimasifkan lagi. "Nanti saya sesuaikan jadwal Bapak Presiden. Tanggal 17 Oktober akan kami gerakkan seluruh Indonesia," ujarnya. (agf/idr/syn/wan/elo/dho/c19/fal)

Title	Stok Beras Dijamin Aman
Date	6 Oktober 2023
Media	Jawa Pos
Page	10
Author	Bry/ind



Kementerian Pertanian

Stok Beras Dijamin Aman

Pemerintah Tidak Akan Melakukan Intervensi Pasar

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memastikan belum menginstruksikan untuk membatasi pembelian beras dalam kemasan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, Robet T.P. Siagian kemarin (5/10).

Menurut dia, sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, stok beras dalam negeri masih dalam posisi aman. Ketersediaan beras di gudang Perum Bulog mencapai 1,7 juta ton untuk bulan Oktober. Jumlah cadangan beras ini akan meningkat 2 juta ton pada November mendatang.

"Jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November," papar dia.

Dia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun. Bantuan ini akan menasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sedangkan, terkait dengan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pembatasan pembelian beras maksimal 10 kilogram (kg) per konsumen per hari di ritel mo-



DICARI: Beras kemasan dari Bulog sangat dibutuhkan oleh warga. Pemerintah tak membatasi jumlah pembelian beras di pasaran.

dern adalah merupakan inisiatif atau kebijakan manajemen toko ritel.

Robet menjelaskan bahwa skema pembatasan pembelian beras di toko ritel tersebut dikhususkan pada beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang digelontorkan oleh Perum Bulog.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel,

hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog," ucap dia. "Adapun, untuk pembatasan pembelian beras komersial diserahkan ke masing-masing ritel. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan melakukan intervensi pasar. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," jelas dia.

"Berdasar hasil pemantauan yang dilakukan Dinas, ketersediaan stok di ritel maupun di toko beras aman," sambung dia. Meski begitu, walau stok beras masih aman, pihaknya tetap rutin mengecek ketersediaan stok beras di pasaran. Pemkot Bekasi berpedoman pada instruksi Pemerintah Pusat melalui Peraturan Badan Pangan

Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.

"Instruksi ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen, pemerintah melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras melalui penetapan harga eceran tertinggi beras," papar dia. **(bry/ind)**

Title	Dari "Wild Card" Inflasi hingga Penyelewengan Beras Bulog
Date	6 Oktober 2023
Media	Kompas
Page	9
Author	Hendriyo Widi



Kementerian Pertanian

PANGAN POKOK

Dari "Wild Card" Inflasi hingga Penyelewengan Beras Bulog

Lembaga Penelitian Makroekonomi ASEAN+3 menyebutkan El Nino menjadi *wild card* atau faktor penentu inflasi di kawasan ASEAN+3. Meski di Indonesia kenaikan harga beras yang berandil paling besar terhadap inflasi tidak hanya akibat dampak El Nino, tetapi juga didorong ulah oknum yang menyelewengkan beras Perum Bulog.

Lembaga Penelitian Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO), Rabu (4/10/2023), merevisi naik proyeksi inflasi di kawasan ASEAN+3 serta pada 2023 dan 2024. ASEAN+3 merupakan negara-negara anggota ASEAN, serta Jepang, China, dan Korea Selatan.

Tingkat inflasi kawasan itu diperkirakan 6,5 persen pada 2023 dan 3,8 persen pada 2024. Perkiraan tersebut dinaikkan dari proyeksi inflasi pada Juli 2023, yakni 6,3 persen pada 2023 dan 3,4 persen pada 2024.

Namun, khusus Indonesia, AMRO justru menurunkan perkiraan inflasi pada 2023 menjadi 3,8 persen dari proyeksi Juli 2023 yang 3,9 persen. Adapun proyeksi inflasi Indonesia pada 2024 masih tetap sama dari proyeksi tiga bulan lalu, yakni 2,8 persen.

Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor mengatakan, kenaikan harga pangan dan energi global dalam beberapa bulan terakhir telah memicu kekhawatiran terjadinya lonjakan harga komoditas. Lonjakan harga komoditas itu dapat berimbas pada kenaikan inflasi.

Kami juga akan menindak tegas para oknum yang memanfaatkan situasi kenaikan harga beras demi keuntungan sendiri.

Hermawan

Kenaikan harga energi terutama dipicu Arab Saudi dan Rusia yang memperpanjang kebijakan pengurangan produksi minyak mentah hingga akhir 2023. Adapun di sektor pangan, kenaikan harganya disebabkan dampak El Nino.

"El Nino adalah *wild card* inflasi, terutama jika memicu pengetatan kebijakan perdagangan pangan utama, seperti beras. Dampak kenaikan harga komoditas terhadap inflasi ASEAN+3 akan lebih berat jika penguatan dollar AS terhadap mata uang kawasan terus berlanjut," kata Khor.

Berdasarkan Statistik Harga Komoditas (Pink Sheet) Bank Dunia Edisi Oktober 2023, harga rata-rata beras pecah 5 persen dari Thailand dan Vietnam pada September 2023 masing-masing 620 dollar AS per ton dan 594,4 dollar AS per ton. Harga beras Thailand itu sudah naik 29,54 persen dan Vietnam 31,94 persen sejak akhir tahun lalu.

Penyelewengan beras

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat, per Sep-

tember 2023 harga rata-rata beras secara nasional di tingkat eceran Rp 13.799 per kilogram. Harga tersebut naik 5,61 persen secara bulanan dan 18,44 secara tahunan.

Hal itu menjadikan beras sebagai komoditas penyumbang utama inflasi September 2023 yang sebesar 0,19 persen secara bulanan dan 2,28 persen secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan itu masing-masing 0,18 persen dan 0,55 persen.

Kenaikan harga beras itu merupakan siklus musiman penurunan produksi setiap musim panen gada. Namun, penurunan produksi pada tahun ini semakin besar karena kekeringan panjang akibat dampak El Nino. Kementerian Pertanian memperkirakan produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton jika El Nino makin kuat.

Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan harga beras di pasar masih tinggi meskipun operasi pasar beras telah digulirkan. Faktor tersebut adalah penyelewengan beras Perum Bulog, yakni mengemas ulang beras Bulog kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Wasoso menyatakan, ada oknum-oknum yang mengganti kemasan beras Bulog dengan kemasan beras premium. Setelah itu, beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau itu dijual kembali dengan harga lebih tinggi setara harga beras premium.

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah mengambil sampel 11 jenis beras impor Bulog untuk dibandingkan dengan beras premium di ritel modern. Hasilnya, beras kemasan ulang itu ada yang identik dengan beras Impor Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi, Kamis (5/10/2023), mengatakan, telah meminta Satgas Pangan menegakkan hukum terkait kasus itu. Kasus itu juga tidak akan menyurutkan upaya pemerintah menguyur pasar beras dengan beras Bulog untuk menurunkan harga komoditas pangan pokok tersebut.

"Untuk Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, misalnya, dari permintaan sekitar 8.000 ton, sudah kami penuhi sebanyak 5.500 ton," katanya.

Kepala Subsatgas Ketersediaan Satgas Pangan Polri Komisaris Besar Hermawan mengatakan, Satgas Pangan telah menindaklanjuti temuan dan laporan terkait dengan dugaan pengoplosan dan ganti kemasan beras Bulog tersebut. Salah satu metode yang diterapkan adalah pengambilan dan perbandingan sampel beras Bulog dengan beras premium yang dijual ke konsumen.

Sejak Januari 2023 hingga 5 Oktober 2023, Satgas Pangan telah menangani 10 kasus terkait hal itu dengan jumlah tersangka 10 orang. Dari jumlah itu, delapan kasus pemberkasan hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan


beberapa di antaranya sudah masuk persidangan.

"Selama program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih berlangsung, kami akan terus mengawasi pendistribusian pangan, termasuk beras, yang digulirkan pemerintah dalam operasi pasar. Kami juga akan menindak tegas para oknum yang memanfaatkan situasi kenaikan harga beras demi keuntungan sendiri," ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis.

(HENDRIYO WIDI)

UBLIK

KEMENTERIAN

Title	Kekurangan Sumber Air, Petani Gagal Panen	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Kompas	
Page	10	
Author	JAL/XTI	

KEKERINGAN

Kekurangan Sumber Air, Petani Gagal Panen

KENDARI, KOMPAS — Kekeringan lahan pertanian akibat kemarau panjang di Sulawesi Tenggara terus meluas. Sebanyak 1.177 hektar lahan mengalami gagal panen, lalu bertambah ratusan hektar dalam dua pekan. Ribuan hektar sawah lainnya masih terancam.

Jumono (46), Ketua Kelompok Tani Ujung Bulu, Bombana, Sultra, mengungkapkan, kekeringan membuat belasan hektar sawah gagal panen. Hal itu menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. "Dari 42 hektar lahan sawah di kelompok kami, 10 hektar itu betul-betul gagal panen. Selebihnya, kami panen dengan kondisi kurang air. Jadi, hasilnya jauh di bawah rata-rata," kata Jumono, saat dihubungi, Kamis (5/10/2023).

Saat panen tahun-tahun sebelumnya, ia menceritakan, satu hektar lahan sawah bisa menghasilkan 5-6 ton gabah. Tahun ini, mereka hanya menghasilkan 2 ton gabah. Mereka hanya menjual setengah hasil panen dan sebagian disimpan untuk keluarga.

Padahal, modal menggarap satu hektar lahan berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Meski harga gabah basah naik berkisar Rp 6.000 per kilogram, hasil panen masih jauh dari harapan.

Gagal panen yang terjadi, kata Jumono, karena sulitnya mendapatkan sumber air. Kondisi persawahan yang meng-

dalkan curah hujan sangat terdampak dengan kekeringan panjang. Bantuan pompa dari pemerintah tidak berfungsi karena tidak ada sumber air.

Kesulitan yang sama terjadi di wilayah Konawe Selatan. Sukardi (54), Ketua Kelompok Tani Morini, Desa Lambakara, Lainya, menyampaikan, meski tak sampai gagal panen, para petani hanya menggarap sebagian lahan.

"Lahan saya empat hektar, yang ditanami cuma setengah hektar. Karena kami bergantung pada mesin pompa, sementara biaya bahan bakar sangat tinggi. Dalam sehari membutuhkan bahan bakar Rp 65.000 dan itu sangat berat. Belum lagi biaya benih dan pupuk," katanya.

Data Dinas Pertanian dan Peternakan Sultra, sawah terdampak kekeringan semakin meluas. Hingga akhir September, sebanyak 3.685 hektar sawah mengalami kekeringan. Jumlah sawah yang kering akibat kemarau panjang terus meningkat. Dua pekan sebelumnya, sawah yang terdampak kekeringan seluas 2.560 hektar, dengan 824 hektar sawah yang mengalami gagal panen.

Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan Sultra Eva Yanti Nurdin menuturkan, lahan yang terdampak kekeringan memang terus meluas. Sawah gagal panen milik petani juga terus bertambah selama satu bulan terakhir.

Menurut Eva, kondisi ini terjadi karena cuaca yang masih dalam pengaruh El Nino. Kemarau panjang terjadi sehingga daerah sentra pangan mengalami kekeringan. Sawah yang sebagian adalah tadah hujan pun kering kerontang. "Wilayah yang paling terdampak adalah Bombana dengan total lahan 1.872 hektar, dengan 1.135 hektar di antaranya gagal panen. Menyusul wilayah Konawe Selatan dengan luasan 1.546 hektar, tetapi dengan lahan puso 10 hektar," tuturnya.

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengatasi kekeringan panjang. Salah satu yang utama adalah bantuan pompa di sejumlah wilayah terdampak. Namun, tidak semua lokasi bisa dibantu karena kurangnya ketersediaan sumber air.

Pangan nonberas

Di Semarang, Jawa Tengah, pemerintah kota setempat mengajak warga untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Semarang adalah menggelar Festival Pendamping Beras. Dalam kegiatan itu, warga dikenalkan berbagai jenis makanan pengganti beras berikut cara pengolahannya.

Festival Pendamping Beras bakal diadakan di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Minggu (8/10). Dalam kegiatan itu, akan ada 114 stan yang memperagakan cara memasak makanan berbahan dasar non-

beras, seperti hanjeli, sukun, porang, pisang, talas, ubi, singkong, sagu, sorgum, dan jagung. Setelah diolah, makanan dibagikan kepada masyarakat sebagai wujud memperkenalkan produk olahan pangan nonberas.

"Di tengah naiknya harga beras akibat dampak El Nino, kami berinisiatif mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan nonberas," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Balai Kota Semarang, Kamis (5/10).

Sebelumnya, pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang, mengeluhkan harga beras yang terus melambung. Mardiyah (55), pedagang di Pasar Karangayu menyebut, rata-rata harga beras premium pada Rabu (4/10) sebesar Rp 15.000 dan harga beras medium tembus Rp 14.000 per kilogram. Harga itu jauh di atas harga eceran tertinggi untuk beras medium sebesar Rp 10.900 per kilogram dan harga beras premium sebesar Rp 12.900 per kilogram.

Tingginya harga beras memicu kenaikan inflasi pada September 2023. Kota Semarang menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi di Jateng, yakni 0,42 persen. Angka itu lebih tinggi dari inflasi Jateng pada September 2023, yakni 0,41 persen.

Festival Pendamping Beras bukanlah upaya pertama yang dilakukan Pemkot Semarang untuk mendorong pemanfaatan

pangan nonberas. Dalam beberapa kesempatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Bambang Pramusinto genar mengajak masyarakat di wilayahnya untuk beralih ke tanaman pangan nonberas.


"Kota Semarang memiliki beberapa komoditas yang bisa menjadi alternatif pangan pengganti beras, misalnya singkong dan jagung. Kami sering mengedukasi masyarakat, tetapi memang harus digenjet supaya pola pikir masyarakat tentang kalau belum makan nasi belum makan itu pelan-pelan bisa diubah," papar Bambang.

Selain diajari cara mengolah, warga juga didorong untuk menanam sendiri pangan nonberas dalam Festival Pendamping Beras. Selama ini, mayoritas masyarakat masih harus membeli produk pangan, baik beras maupun nonberas dari wilayah lain. Melalui program tersebut, Kota Semarang diharapkan bisa menuju kota yang berdaulat pangan.

Pemkot Semarang berupaya menginventarisasi lahan-lahan milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam. Lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan berada di Kecamatan Gunungpati dan Mijen. "Nanti kita pakai sistem bagi hasil, 70 persen untuk masyarakat dan 30 persen untuk pemerintah kota jika pemerintah yang menyediakan sarana produksi pertanian," tutur Hevearita. (JAL/XTI)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**


Title	Panen Jagung Saat Puncak Kemarau	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Kompas	
Page	9	
Author	Kompas/P Raditya Mahendra Yasa	

Panen Jagung Saat Puncak Kemarau



KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Musim kemarau yang masih menjadi berkah bagi sebagian petani ketika mereka dapat memanen jagung di Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (5/10/2023). Jagung menjadi salah satu komoditas utama bagi petani agar terus memproduksi selama musim kemarau. Harga jagung yang pada saat ini mereka jual Rp 6.000 per kilogram sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak.

Title	BEEF Bakal Impor 15.000 Ekor Sapi Hidup	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	11	
Author	Diki Mardiansyah	

■ KINERJA EMITEN

BEEF Bakal Impor 15.000 Ekor Sapi Hidup

JAKARTA. Emiten pengolahan daging dan makanan beku dengan merek Kibif, PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) membidik impor sapi hidup sebanyak 14.000-15.000 ekor sapi pada tahun 2024 mendatang.

Rencananya sapi hidup tersebut dibeli dengan harga pembelian maksimal Rp 20 juta per ekor dari Australia.

Berdasarkan catatan KONTAN, BEEF mendapatkan kuota impor sapi untuk tahun 2023 sebanyak 12.000 ekor sapi. Sementara di tahun 2024, BEEF mengajukan izin impor ke pemerintah sebanyak 15.000 ekor sapi. Dengan begitu, di tahun depan impor BEEF meningkat 16,6%-25% dibandingkan impor sepanjang tahun ini.

Direktur Utama BEEF, Imam Subowo mengatakan, target impor sapi hidup dari Australia ini harus sejalan dengan kemampuan penjualan sapi hidup, termasuk juga penjualan makanan olahan daging milik BEEF.

Perusahaan ini menargetkan, penjualan sapi hidup di di tahun depan sebanyak 1.000 ekor per bulan.

"Ya target kami sepanjang tahun depan sebanyak 14.000

hingga 15.000 sapi. Kami sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar rupiah. Sebab, nilai tukar rupiah akan sangat mempengaruhi pembiayaan impor sapi hidup tersebut," kata Imam, Kamis (5/10)

Imam menuturkan, kerja sama dengan eksportir diperlukan untuk menentukan harga beli sapi. Dalam kerja sama itu akan dibahas juga upaya-upaya untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Selain menggenjot impor sapi hidup, BEEF juga tengah menggeber infrastruktur untuk menggenjot produksi. "Kami akan membangun *cold storage* (gudang pendingin) di atas tanah seluas 20 hektare di Subang dengan kapasitas penyimpanan 25.000 ton daging sapi," kata Imam.

Untuk diketahui, di semester I-2023, BEEF mencatat laba bersih sebesar Rp 52 miliar. Laba bersih ini ditopang dengan angka penjualan yang melesat tajam menjadi Rp 301,70 miliar. Penjualan tersebut tumbuh 191,7% dibanding periode sama tahun lalu.

Penjualan daging menjadi



Dok. BEEF

Catatan KONTAN, BEEF mendapatkan kuota impor sapi untuk tahun 2023 sebanyak 12.000 ekor sapi.

kontributor utama pendapatan BEEF di semester I 2023. Kontribusinya mencapai 99% dari total penjualan, dengan nilai penjualan mencapai Rp 297,5 miliar. Angka ini tumbuh 77% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,2 miliar.

Bukan saja penjualan da-

gung sapi, kinerja yang cemerlang di semester I 2023 juga turut dikontribusi dari penjualan daging kerbau. BEEF mendistribusikan penjualan sapi hidup dan produk turunannya ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga ke sejumlah pasar modern.

Diki Mardiansyah

Title	ID Food Raih Pinjaman Rp 1,5 Triliun dari Himbara	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Lailatul Anisah	

■ KOMODITAS PANGAN

ID Food Raih Pinjaman Rp 1,5 Triliun dari Himbara

JAKARTA. Holding Pangan ID Food mendapatkan pinjaman murah dari anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan modal kredit tersebut, ID Food bakal menjadi *offtaker* harga gula, daging dan minyak goreng

"Pinjaman tersebut akan digunakan ID Food untuk melakukan fungsi sebagai *offtaker* harga gula, daging dan minyak goreng dari produsen," kata Direktur Utama Holding Pangan ID Food, Frans Marganda Tambunan, Rabu (4/10).

Frans menjelaskan, dengan perannya sebagai *offtaker*, maka pihaknya dapat mudah melakukan stabilisasi harga karena memiliki stok. ID Food menargetkan pada pekan depan sudah mulai menyerap beberapa komoditas tersebut.

Targetnya, pada akhir tahun sampai dengan Lebaran 2024 tidak ada banyak gejolak harga pada gula, daging dan minyak goreng. "Jadi memang persiapan untuk stabilisasi akhir tahun dan mulai persiapan lebaran 2024," jelas

Frans.

Di sisi lain, ID Food akan menjalani penugasan mengimpor gula sebanyak 125.000 ton untuk meredam gejolak harga gula konsumsi di dalam negeri. Menurut Frans, impor yang akan dilakukan ini merupakan penyelesaian penugasan impor gula sebanyak 250.000 ton untuk tahun ini.

"Kami akan merealisasikan sisa penugasan 250.000 ton karena baru selesai 50%, dan itu akan kita pakai untuk aminin harga," ujar dia.

Yang terang, impor gula ini

memang diperlukan lantaran produksi gula konsumsi dalam negeri defisit sampai 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri setiap tahunnya.


Rencananya, impor gula akan didatangkan dari Brazil. Namun demikian, ID Food masih menunggu keputusan pemerintah terkait pelaksanaan impor. "Nanti begitu ada keputusan dari pemerintah, kami akan segera laksanakan," jelas Frans.

Adapun total kebutuhan gula nasional yang mencapai

sekitar 6 juta ton, sementara produksi nasional hanya 2,2 juta ton per tahun. Akibatnya, ada defisit gula sebesar 3,8 juta ton yang harus dipenuhi dari impor.

Sementara itu, mengacu panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (5/10) rerata harga gula konsumsi mencapai Rp 15.400 per kg atau masih lebih tinggi dari Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang senilai Rp 14.500 per kg.

Lailatul Anisah

Title	Indonesia Impor Beras 1,5 Juta Ton dari China	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Lailatul Anisah	

Indonesia Impor Beras 1,5 Juta Ton dari China

Impor beras ditargetkan akhir tahun ini untuk antisipasi penurunan produksi dan efek El Nino

Lailatul Anisah

JAKARTA. Pemerintah membuka opsi untuk impor beras sebanyak 1,5 juta ton dari China. Keputusan ini dilakukan lantaran harga beras di pasar lokal mendaki dan penurunan produksi akibat fenomena El Nino.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas mengatakan, pemerintah sudah menggelar rapat teknis, terkait antisipasi dampak dari El-Nino yang menyebabkan penurunan produksi dan panen raya diprediksi bakal mundur. "Jauh hari pemerintah harus menyiapkan strategi. Jangan sampai begitu kita lihat kurang baru nanti kita berikut untuk impor," jelas dia, kemarin.

Bulog sudah melakukan peninjauan impor dari beberapa negara. Salah satunya yaitu China. Menurut Buwas, China

berkomitmen untuk menyiapkan satu juta ton beras untuk di ekspor ke Indonesia bila sewaktu-waktu Indonesia membutuhkan. "Tidak langsung di ambil, kita lihat dulu kebutuhannya, tapi China sudah menyiapkan kalau kita ada *emergency*," jelasnya.

Untuk impor beras, Bulog

juga masih melakukan lobi dengan India. Namun hingga saat ini India masih memperketat kebijakan ekspor beras.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, berdasarkan hitungannya, Indonesia mungkin akan impor sebanyak 1,5 juta ton beras akhir tahun ini. Pertimbangannya, untuk memenuhi cadangan beras Bulog di akhir tahun yang harus mencapai 1 juta ton. "Setelah November, 1,5 juta ton beras pokoknya, apapun kita kerjakan kalau memang kurang, kenapa enggak. Pilih mana punya stok atau tidak punya stok?," jelas Arief.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyoroti rencana pemerintah membuka keran impor beras lagi. Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi (P3A) SPI, Muham-

mad Qomarun Najmi menilai, rencana ini berpotensi merugikan petani. Sebab petani baru saja merasakan kenaikan harga beras yang hari ini terjadi.

"Pasti akan berdampak ke harga. Jadi tidak membuat petani semangat, karena setiap ada sedikit keuntungan tiba-tiba ada impor lagi," kata Qomar pada KONTAN, Kamis (5/10).

Qomarun berujar, kenaikan

harga beras tidak selalu menguntungkan petani. Sebab, biasanya kenaikan beras diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Sehingga, keuntungan yang didapat petani relatif kecil. Alih-alih melakukan impor, SPI justru menagih pemerintah untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.

Dengan demikian, petani mau menyvetor gabah atau berasnya ke Bulog dan pemerintah tidak perlu melakukan impor karena pemerintah mendapatkan kepastian cadangan beras pemerintah (CBP) dari petani langsung.

"Kita sebenarnya minta HPP yang melindungi petani dan dibarengi dengan pembatasan HET beras yang juga melindungi konsumen untuk mengantisipasi spekulasi beras," tandas Qomarun.

Impor Beras


Tahun	Nilai / Ton
2014	844.163,7
2015	861.601
2016	1.283.178
2017	305.275
2018	2.253.824
2019	444.508
2020	356.286
2021	407.741
2022	429.207
2023*	2.000.000

Keterangan: Proyeksi; Sumber: BPS

Produksi dan Konsumsi Beras Nasional (juta ton)

Tahun	Produksi	Konsumsi	Produksi-Konsumsi
2018	33,94	20,57	4,37
2019	31,31	28,93	2,38
2020	31,50	29,37	2,13
2021	31,36	30,04	1,31
2022	31,54	30,20	1,34
2023*	20,82	17,70	3,03

Keterangan: Per Januari-Juli; Sumber: Bapanas


Title	Pupuk Bersubsidi	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	11	
Author	Antara/Budi Candra Setya	

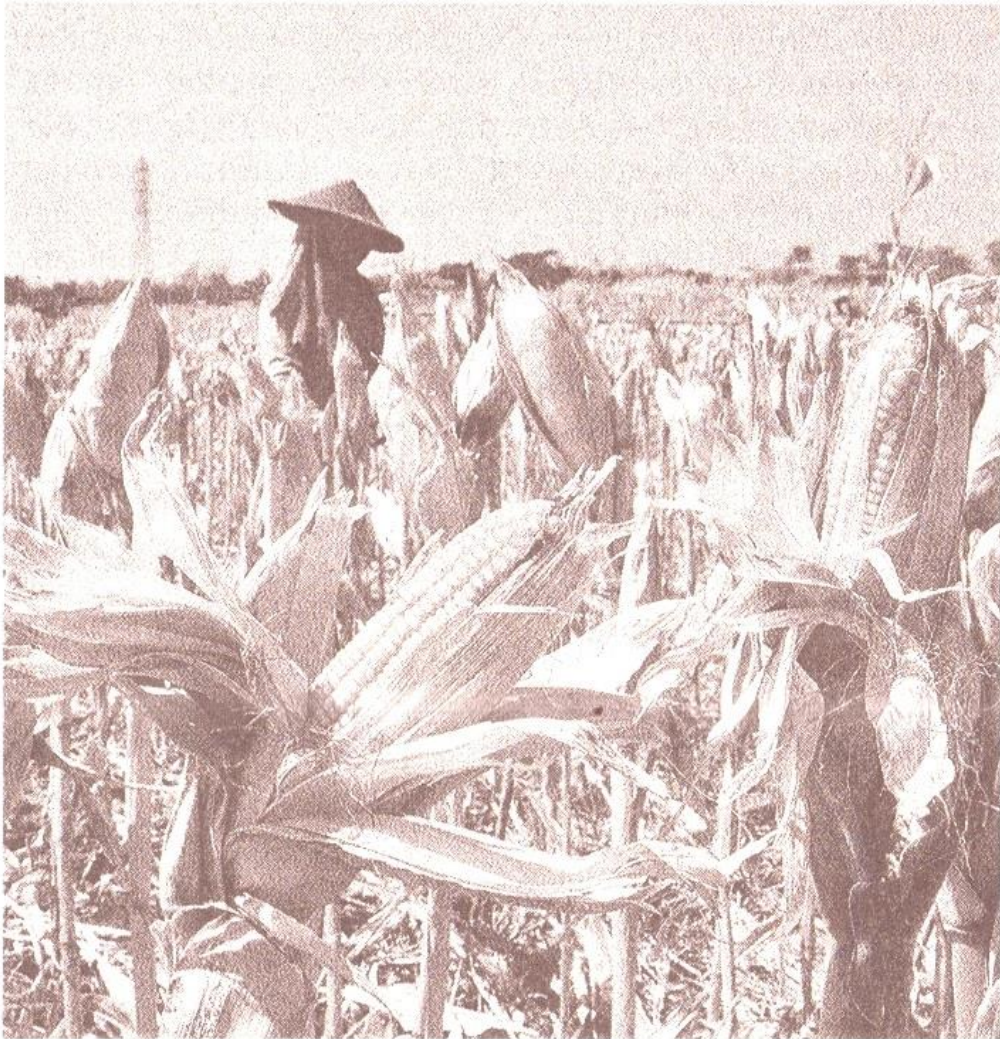
Pupuk Bersubsidi



ANTARA/Budi Candra Setya


Pekerja menurunkan pupuk dari kapal di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (4/10). Data Pupuk Indonesia menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi di Jawa Timur sebanyak 203.645 ton, atau tiga kali lipat dari ketentuan minimum pemerintah sebagai persiapan musim tanam.

Title	PANEN JAGUNG	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Antara/Siswowododo	



ANTARA/SISWOWIDODO

PANEN JAGUNG: Petani memanen jagung di Kedungguwo, Sukomoro, Magetan, Jawa Timur, kemarin. Harga jagung di tingkat petani di wilayah itu Rp5.900 per kilogram, lebih tinggi jika dibandingkan dengan musim panen tahun lalu Rp4.000 per kilogram, yang menurut petani disebabkan meningkatnya kebutuhan pakan ternak ayam.

Title	Warga Kecewa Kehabisan Beras Murah	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	RZ/DW/MY/TB/LD/BN/FL/N-1	

Warga Kecewa Kehabisan Beras Murah

OPERASI pasar beras murah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, diwarnai aksi protes kaum mak-mak karena banyak yang tidak kebagian. Padahal, warga sudah rela antri panjang dan lama.

Pemkab Purwakarta menggelar operasi pasar beras murah, kemarin, dengan harga jual Rp10.400 per kilogram (kg) untuk beras medium, le-

bih murah jika dibandingkan dengan harga beras medium di pasar dijual Rp14 ribu per kg.

“Sudah antri panjang panas-panas, sampai di sini sudah habis,” kata Neni, warga yang antri operasi pasar beras.

Sejumlah warga juga kecewa tidak mendapatkan beras murah. Menurut petugas, beras akan didatangkan lagi, tetapi belum tahu kapan.

Pj Bupati Purwakarta Benni Irwan menanggapi hal itu mengatakan operasi pasar menyediakan 5 ton beras dari Bulog. “Jika habis akan segera ditambah,” ujarnya.

Operasi pasar beras juga dilakukan Pemprov Sulawesi Tengah dan dipusatkan di Lapangan Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Sigi, untuk menstabilkan harga.

Sementara itu, masalah pembatasan pembelian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), sejumlah daerah menyatakan kebijakan itu untuk pemerataan.


“Pertimbangannya pemerataan,” tegas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi.

Bulog Wilayah Sumsel dan

Bangka Belitung memastikan stok beras melimpah untuk program beras SPHP. Demikian juga Bulog Bengkulu tidak membatasi.

“Kami tidak membatasi, tapi kalau untuk pembelian beras SPHP tersebut harus sewajarnya,” kata Pimpinan Perum Bulog Wilayah Sumsel Babel Mohamad Alexander.

(RZ/DW/MY/TB/LD/BN/FL/N-1)

Title	Arab Saudi Apresiasi RI Soal Dam	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Koran Gala	
Page	10	
Author	Enton Supriyatna Sind	

Arab Saudi Apresiasi RI Soal Dam

KEMENTERIAN Haji dan Umrah Arab Saudi mengapresiasi perbaikan pengelolaan dam (denda) jemaah dan petugas haji. Bahkan Saudi sendiri berkomitmen akan menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara lainnya.

Demikian dikatakan Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Khalilurrohman, saat mendampingi Dirjen PHU Hilman Latief dalam pertemuannya dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu (4/10) seperti dikutip laman kemenag.go.id.

Namun demikian, kata Khalil, pelaksanaan penyembelihan hewan yang digunakan untuk dam saat ini belum bisa dilaksanakan di Tanah Air karena belum ada fatwa yang

memperbolehkannya. “Hasil Bahtsul Masail dan Mudzakah Perhajian Nasional menyampaikan fatwanya, penyembelihan hewan dam tidak boleh dilakukan di Tanah Air,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan tata kelola dam ini dimaksudkan agar pengelolaan dam petugas dan jemaah haji juga dapat didistribusikan kembali ke Tanah Air. Bahkan ada diskursus yang mengatakan daging-daging tersebut didistribusikan ke negara-negara Afrika, sehingga hasil dari dam tersebut tidak diketahui secara jelas.


“Kita tidak tahu apa yang terjadi, siapa yang menyembelih, kapan di mana penyembelihannya, kemudian tata kelolanya seperti apa kemudian juga setelah disembelih daging dikemakan, siapa yang mem-

bagikan di mana ke mana,” kata Hilman.

Untuk mengoptimalkan hal tersebut, kata Hilman, Kementerian Agama sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sebagai pihak yang akan mendistribusikan daging dam tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk program pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat Indonesia.

“Kita manfaatkan dalam program untuk peningkatan gizi dan sebagainya. Oleh karena itu kami menggandeng Baznas sebagai pilot projectnya dan kami terus mempelajari apa saja persyaratan apa saja dan lain sebagainya yang diperlukan agar kita bisa mengoptimalkan itu,” ujarnya. **(Enton Supriyatna Sind)****



Title	Pemerintah Tak Serius Garap Pangan Lokal	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Pikiran Rakyat	
Page	1 Part 1	
Author	Pikiran Rakyat	




Pemerintah Tak Serius Garap Pangan Lokal

KETERGANTUNGAN masyarakat terhadap beras kembali "digugat". Apalagi, saat ini, produksi beras tengah menurun akibat El Nino. Para pejabat pun berteriak lantang, mengajak masyarakat beralih ke sumber pangan karbohidrat selain beras atau diversifikasi pangan. Namun, ajakan itu tampaknya gampang menguap ketika harga dan pasokan beras stabil.

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak masyarakat beralih ke sumber pangan karbohidrat selain beras atau diversifikasi pangan. "Tolong ditekankan betul, diversifikasi pangan, jadi tidak hanya mengandalkan beras sebagai makanan pokok," ujarnya, seperti dilaporkan kontributor "PR" **Satrio Widianto** di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Imbauan untuk tidak tergantung pada beras sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah pejabat lainnya. "Kita ingin banyak alternatif-alternatif, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, (Bersambung ke hal. 10 kol. 1)



SEJUMLAH pengunjung menantap makanan di warung Tegol (warteg), Jalan Braga, Kota Bandung, Kamis (5/9/2023). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi makanan pokok nonberas, seperti ubi dan sorgum, untuk menjasati harga beras yang naik.*

Title	Pemerintah Tak Serius Garap Pangan Lokal	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Pikiran Rakyat	
Page	1 Part 2	
Author	Pikiran Rakyat	

Pemerintah Tak

(Sambungan dari hal. 1 kol. 2)

alternatif-alternatif bahan pangan. Tidak hanya tergantung pada beras karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga ini sebetulnya tanaman lama kita, yang ketiga adalah sorgum," ujar Presiden, beberapa waktu lalu.

Ajakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang meminta masyarakat untuk beralih dari mengonsumsi beras ke sumber pangan lokal seperti jagung, talas maupun sagu, nyatanya berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah. Soalnya, selama ini, pemerintah pun masih fokus pada komoditas pangan strategis, seper-

ti beras.

"Sampai sekarang, belum terjadi diversifikasi pangan-pangan, masih sebatas rekomendasi-rekomendasi saja, belum ada aksi kolektif yang nyata dari pemerintah dan stakeholder untuk membangun pangan lokal," kata pengamat pertanian Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian saat dihubungi kontributor "PR" **Dinni Kamilani**, Kamis (5/10/2023).

Eliza mencontohkan, salah satunya program pemerintah tentang *food estate* atau lumbung pangan nasional di Kalimantan, Sumatra, dan Papua, yang terkesan memak-

sakan komoditas, seperti beras dan jagung, untuk ditanam di wilayah tersebut. Padahal, justru wilayah tersebut punya tanaman lokal masing-masing.

"Pemerintah membawa *food estate*. Dia menanam beras di Papua, padahal kan Papua punya sagu. Jadi, tanaman yang eksisting di sana itu dibabat habis karena untuk ditanam *food estate*. Jadi, orientasi kebijakannya keliru. Mereka masih berorientasi pada kebijakan memproduksi beras. Hasilnya, tanaman yang tidak sesuai agroklimatnya berujung kegagalan," ujar Eliza.

Garap serius

Eliza menyebut, sudah saatnya diversifikasi pangan ini digarap serius oleh peme-

rintah. Indonesia seharusnya berkaca ke India yang sudah sejak lama melakukan peng-anekaragaman pangan sehingga tidak bergantung pada satu komoditas saja.

"India komposisi pangan-pangan 43% beras, 40% gandum, dan sisanya komoditas pangan lokal. Jadi, mereka tidak tergantung beras. Berbeda dengan kita yang saat ini sangat tergantung dengan beras. Bahayanya, ketika ada gejolak di perberasan ini, maka imbasnya akan sangat terasa di masyarakat," ujarnya.

Diversifikasi pangan di Indonesia, kata Eliza, bukanlah isu baru. Sejak lama, beberapa kali, pemerintah menawarkan solusi ini. Namun, sayangnya, pemerintah juga yang tidak pernah serius

menggenjot pangan lokal ini. Padahal, jika program pangan lokal ini digarap serius oleh pemerintah, para petani pun tidak akan sulit untuk mulai memproduksi pangan lokal ini.

"Sederhananya, petani itu diberi *market* yang jelas dan dikasih harga yang baik, tanpa disuruh pun mereka akan menanam. Contoh kasus, beberapa tahun lalu, ketika pemerintah stop impor jagung, mau enggak mau petani dalam negeri menanam. Apalagi, saat itu, harganya sedang bagus. Enggak usah disuruh, mereka tanam itu jagung sampai tanah kuburan pun ditanami jagung," ujarnya.

Lantas bisakah masyarakat beradaptasi untuk diversifikasi dan tidak bergantung

dengan beras? Tanpa disadari, ungkap Eliza, sekarang ini, sebagian masyarakat sudah mulai melakukan diversifikasi pangan. Namun, sayangnya, diversifikasi itu belum beralih pada pangan lokal.

"Justru kebanyakan mereka beralih pada produk olahan gandum, seperti mi, *oatmeal*, roti yang berasal dari gandum. Wajar saja, olahan gandum, selain lebih cepat penyajiannya, juga mudah ditemukan di mana pun dan harganya terjangkau. Berbeda dengan olahan pangan lokal yang sekarang ini hanya ada di *marketplace* tertentu saja," katanya.

Eliza mengungkapkan, komoditas gandum tidak dapat diproduksi di Indonesia. Akibatnya, Indonesia harus im-

por 100%.


"Ini kan juga bahaya untuk Indonesia ke depannya karena kita malah ketergantungan sama pangan luar. Bahkan, saat ada konflik Rusia dan Ukraina, kan langsung terasa gandum ini dampaknya," ujarnya.

Eliza tak memungkiri, ada pangan lokal yang saat ini sedang tren, yakni olahan nasi porang. Namun, harganya masih relatif mahal dibandingkan beras dan belum memasyarakat.

"Alhasil, masyarakat akan kembali memilih beras karena lebih ekonomis. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan industri olahan pangan lokal yang ada agar bisa diproduksi massal dengan harga yang terjangkau," katanya.***

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Presiden Minta TNI Peka Persoalan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Radar Bandung	
Page	1 Part 1	
Author	Agf/idr/syn/wan/elo	



FEDRIK TARIGAN/JAWA POS

HUT TNI : Presiden Joko Widodo saat inspeksi pasukan dalam peringatan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada Kamis (5/10).


Presiden Minta TNI Peka Persoalan Pangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dalam peringatan HUT ke-78 TNI di Monumen Na-

sional, Jakarta Pusat pada Kamis (5/10). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menitipkan beberapa pesan untuk TNI. Diantaranya

agar seluruh jajaran TNI peka terhadap persoalan pangan yang kini sudah menjadi masalah global.

■ **PRESIDEN**Baca Hal 2

Title	Presiden Minta TNI Peka Persoalan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Radar Bandung	
Page	1 Part 2	
Author	Agf/idr/syn/wan/elo	

Presiden Minta TNI Peka Persoalan Pangan

▣ Sambungan *dari Hal 1*

Pesan tersebut disampaikan oleh presiden di hadapan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan para prajuritnya. "Saya minta seluruh anggota TNI punya kesadaran dan kepekaan terkait ini. Karena urusan pangan adalah urusan perut. Sangat penting dan penentu stabilitas bangsa," ungkap Jokowi. Dia menyebut, saat ini krisis pangan sudah terjadi di banyak negara.

Menurut Jokowi, salah satu sebab munculnya krisis pangan adalah perubahan iklim dan terganggunya rantai pasok dunia. Akibatnya 22 negara kini membatasi ekspor pangan, bahkan ada yang menghentikan ekspor pangan. Karena itu, presiden mengingatkan TNI untuk peka terhadap persoalan pangan. Sehingga Indonesia bisa melalui krisis yang sedang terjadi tersebut.

Panglima TNI memastikan, dirinya akan menindaklanjuti pesan yang disampaikan oleh presiden. Dia pun menyadari bahwa persoalan pangan sudah menjadi masalah global. "Tentunya TNI harus peka," ucap Laksamana Yudo. Meski sudah memiliki dan menjalankan berbagai program terkait pangan, dia menyatakan, pihaknya bakal lebih giat lagi melaksanakan program tersebut.

Saat ini, TNI sudah punya Gerakan Nasional Ketahanan Pangan. Program itu berjalan di seluruh jajaran. Baik di TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Mereka memanfaatkan lahan-

lahan tidur atau lahan milik TNI yang masih kosong. Yudo menyebut, dia sudah mengarahkan jajarannya untuk melaksanakan program tersebut. Tujuannya tidak lain membantu ketahanan pangan.

Dalam waktu dekat, lanjut Yudo, gerakan itu bakal dimasifkan lagi. "Nanti saya akan sesuaikan jadwal bapak presiden, tanggal 17 Oktober akan kami gerakan seluruh Indonesia," bebarnya. Yudo memastikan, instansinya akan terus mengupayakan yang terbaik demi membantu masyarakat. Tidak terkecuali dalam mengatasi krisis pangan global.

Kemarin Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menegaskan bahwa pihaknya akan mengetatkan pengawasan distribusi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sedang berjalan. Sebab, Buwas menengarai ada praktik kecurangan oknum yang berupaya mengambil keuntungan sehingga harga beras tak kunjung turun.

Beberapa temuan yang didapati, sambung Buwas, adalah pengoplosan beras Bulog, sampai mengganti kemasan beras Bulog dengan karung beras merek lokal premium. "Beras Bulog dimasukkan ke packaging merek-merek mereka untuk disuplai dan dijual dengan harga tinggi premium," ujar Buwas.

Mengenai hukuman atau sanksi yang bakal diberikan, Bulog akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Men-

urut Buwas, pelaku bisa dijeraat hukum pidana kasus penipuan dan penyalahgunaan beras milik negara. "Indikasi penyimpangan itu selalu ada karena ada peluang atau kesempatannya," ucapnya.

Ikut menegaskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa distribusi beras SPHP akan berjalan seiringan dengan pengawasan dan penegakan hukum. "Kita libatkan semua, satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," ujar Erick.

Terkait potensi kecurangan beras, Erick menegaskan bahwa data produksi dan impor beras Indonesia harus satu data. Jika berjalan sendiri-sendiri, menurut Erick hal itu seringkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat. "Jadi kami ingin mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani, pemainnya nanti begitu-begitu saja, selalu ingin cari uang cepat. Nah, ini harus diberantas," beber Erick.

Terpisah, Pakar Kebijakan Agribisnis Departemen Agribisnis IPB Feryanto menuturkan tidak melihat adanya potensi panic buying akibat stok beras di Indonesia. Menurutnya ketersediaan beras relatif masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Walaupun dengan kenaikan harga, karena panen terganggu," katanya.

Sementara itu untuk masyarakat menengah ke atas dapat mengalihkan ke beras medium dan premium lainnya. Dia mengatakan yang perlu dijaga pemerintah adalah masyarakat miskin. Caranya dengan memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin. Agar pengeluaran mereka terjaga dan tidak jatuh lebih miskin lagi.


Pria yang akrab disapa Fery itu mengatakan, banyak kajian dan diskusi yang menyebutkan bahwa el nino memberikan dampak kepada produksi pertanian, terutama pangan beras. Dia mengatakan kemarau kering yang berkepanjangan tahun ini berdampak curah hujan yang rendah. Atau bahkan hampir tidak ada di sebagian wilayah sentra pangan.

Kondisi itu menyebabkan petani tidak bisa menanam dan memanen tanamannya. Sehingga produksi pangan tidak sesuai target. Menurut data Kementan, ada potensi kehilangan produksi beras akibat el nino setara 1,2 juta ton. Namun angka ini, dinilai masih wajar dalam artian dari target produksi nasional sebesar 30 juta ton.

Kemudian BPS mencatat bahwa produksi beras selama periode Januari-Oktober 2023 ditaksir mencapai 27,878 juta ton. "Yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga, akibat penurunan stok ini, yang mudah dipermainkan oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan," jelasnya. (agf/idr/syn/wan/elo)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Leuit dan Cara Masyarakat Bertahan dari Ancaman Krisis Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Inilah Koran	
Page	1 Part 1	
Author	Inilah Koran	

Leuit dan Cara Masyarakat Bertahan dari Ancaman Krisis Pangan

RESEPNYA, setiap panen setahun sekali wajib menyimpan gabah di rumah-rumah leuit untuk cadangan pangan keluarga.

Masyarakat adat Kaolotan Jamrut, Desa Wangunjaya, di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, siang itu sibuk memasukkan padi hasil panen September lalu ke leuit atau lumbung pangan.

Leuit yang terbuat dari atap rumbia dan dinding bambu serta kayu itu berlokasi di belakang permukiman warga setempat. Satu per satu leuit itu dipenuhi padi.

Petani memanggul padi kering itu melintasi jalan setapak dari sawah ke leuit dengan jarak antara 2 kilometer sampai 2,5

kilometer.

Jumlah rumah leuit di Desa Kaolotan Jamrut tercatat sebanyak 174 unit dengan kapasitas gabah 2 ton per unit sehingga total gabah kering yang tersimpan di semua leuit itu sebanyak 348 ton.

Selain itu, masih ada gabah yang dijadikan cadangan pangan masyarakat adat, bahkan konon ada yang sudah berusia 30 tahun.

Dari ketersediaan gabah 348 ton, dipastikan 87 keluarga masyarakat adat Kaolotan Jamrut, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cigemplong, tercukupi kebutuhan pangan mereka hingga tahun 2024.

Sampai saat ini warga adat belum ada yang membeli



ANTARA FOTO

beras, meskipun di tengah kemarau panjang seperti saat ini.

Dulmanan (55), tokoh adat Kaolotan Jamrut yang juga mantri tani Desa Wangunjaya, mengisahkan masyarakat Kaolotan Jamrut sejak zaman


pangan keluarga.

Aturan itu diwariskan oleh leluhur kepada anak cucu mereka agar tidak menimbulkan kerawanan pangan maupun kelaparan ketika padi diserang penyakit yang mengakibatkan gagal panen.

Selain itu juga ketika terdampak bencana alam maupun terjadi konflik sosial dan perang, juga masih memiliki cadangan pangan untuk dikonsumsi keluarga.

Sekitar 99% warga masyarakat adat Kaolotan Jamrut berprofesi petani dengan total lahan garapan seluas 60 hektare. Selain itu, warga juga sebagai perajin gula nira, pekebun kopi, dan beras ungu.

» Bersambung ke Hal 11

Title	Leuit dan Cara Masyarakat Bertahan dari Ancaman Krisis Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Inilah Koran	
Page	1 Part 1	
Author	Inilah Koran	

... Leuit dan Cara Masyarakat Bertahan dari Ancaman Krisis Pangan

> Sambungan hal 1

Masyarakat adat Kaolotan merupakan pengikut Kerajaan Banten dan memeluk agama Islam. Mereka tinggal wilayah di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Kondisi alamnya subur terlihat sumber air dari kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang mengalir ke ratusan hektare persawahan milik masyarakat.

Petani adat Kaolotan juga bercocok tanam tak menggunakan pupuk kimia, mereka lebih memilih pupuk organik alami dengan memanfaatkan kotoran ternak, kompos, dan jerami.

Para petani senantiasa diingatkan mampu memproduksi pupuk organik karena sangat menguntungkan, menyehatkan, dan tidak menimbulkan kerusakan tanah.

Ungu organik Masyarakat adat Kaolotan Jamrut juga menjaga dan melestarikan beras ungu yang kini terancam langka, sebab beras ungu organik itu asli dari nenek moyang leluhur adat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaporkan siap menampung beras ungu organik dari Kabupaten Lebak, hasil pertemuan kerja sama dengan Provinsi Banten. Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur memberikan testimoni tentang kelebihan beras ungu organik itu.

Saat ini, petani juga tengah mengembangkan beras ungu organik seluas 10 hektare dan gerakan tanam serentak yang dilakukan mulai pekan depan. Pengembangan beras ungu organik dengan varietas benih lokal guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di daerah itu.

“Kami mengembangkan beras ungu organik itu agar tidak langka di tengah permintaan pasar yang cukup tinggi,” kata Ketua Koordinator Wilayah Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Cigemblong, Kabupaten Lebak, Yusep Saeful Anwar.

Pengembangan beras ungu organik itu dikelola oleh sebuah gapoktan di Kabupaten Lebak. Padi ungu organik itu dipanen pada usia 6 bulan di lahan persawahan berpengairan cukup. Keunggulan produksi beras itu benar-benar organik tanpa menggunakan pupuk kimia, bahkan sudah mendapatkan Sertifikat Konversi Organik dari Kementerian Pertanian.

Oleh karena itu, petani diminta terus mengembangkan beras ungu organik dan di depan produk ini bisa menembus rak-rak supermarket.

Muhdi (40), petani Kabupaten Lebak, mengembangkan beras ungu organik tersebut guna memotivasi petani di desa ini untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Selama ini, beras ungu organik diklaim memiliki manfaat untuk kesehatan, terutama cocok bagi penderita diabetes melitus. Karena itu harganya pun tergolong tinggi, ukuran 900 gram dijual Rp25 ribu.

Sebetulnya, beras ungu organik itu di wilayah Cigemblong sudah dihasilkan secara turun-temurun, namun baru tahun ini dijual dengan kemasan 900 gram. Beras ungu organik ini diharapkan bisa menjadi produk unggulan daerah sehingga mampu menyejahterakan masyarakat adat.

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak intens mengajak petani mengembangkan pertanian organik karena permintaan pasar cenderung meningkat sehingga bisa mendongkrak pendapatan ekonomi warga.

Pemkab Lebak mengapresiasi petani milenial yang mengembangkan produksi beras ungu organik untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan nasional. Pengembangan produksi beras organik itu merupakan inovasi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lebak.

Dinas Pertanian setempat

mengingatkan petani selalu menjaga mutu beras ungu organik dan mengemasnya dengan menarik. Segala perizinan juga harus dipenuhi, agar beras tersebut bisa menembus pasar modern juga.

Selain menghasilkan beras, masyarakat adat Kaolotan Jamrut hingga kini memproduksi kopi bubuk dan gula aren sebagai andalan ekonomi keluarga dengan mengembangkan perkebunan pohon nira.

Pohon nira dan kopi diperkirakan ditanam di atas lahan seluas 800-1.000 hektare, dengan produksi gula aren mencapai 5 ton per pekan. Saat ini, harga gula aren di pasaran Rp40 ribu/kilogram. Jika produksi 5 ton per pekan maka bisa menghasilkan Rp800 juta per bulan.


Pendapatan produksi gula aren dan kopi bubuk bisa menggulirkan uang di atas satu miliar rupiah dan membantu ekonomi masyarakat adat, mulai petani, penyadap, buruh panggul, hingga pengguna jasa transportasi.

Keunggulan produksi gula aren dan kopi bubuk masyarakat adat Kaolotan Jamrut itu masuk kategori organik karena tidak menggunakan pupuk kimia, sebab lokasinya berada sekitar kawasan kaki gunung TNGHS. Produksi gula aren dan kopi bubuk dikirim ke berbagai daerah, seperti Bandung, Garut, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Keteguhan petani masyarakat adat Kaolotan Jamrut menghasilkan beras ungu, gula aren, dan kopi bubuk tanpa sentuhan pupuk kimia membuktikan produksi mereka tetap disukai banyak orang meski harganya lebih mahal.

Kini, di tengah banyak daerah kekeringan dan terancam krisis pangan, masyarakat adat Kaolotan Jamrut tetap berkelempahan pangan, bahkan masih bisa menjual hasil pertanian lain yang menambah kesejahteraan mereka.

(*)

Title	Beras Mahal di Lumbung Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Batam Pos	
Page	2	
Author	Fadly Rahman	

OPINI

Beras Mahal di Lumbung Pangan



Oleh:
FADLY RAHMAN

Pengajar di Departemen Sejarah dan Filologi
Universitas Padjadjaran

HARGA beras masih tinggi. Penyebab kenaikannya dipertanyakan, mulai siklus panen, menurunnya produksi beras, El Nino, terhentinya impor beras dari India, hingga proyek *food estate* yang oleh beberapa pengamat ditengarai gagal mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Aspek kebijakan tata kelola pangan menjadi salah satu hal yang kerap dipersalahkan dalam perjalanan sejarah pangan di negeri ini. Proyek *food estate* yang saat ini dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat adat, dan kerawanan pangan dalam kacamata historis sejatinya memiliki kausalitas dengan rangkaian kegagalan tata kelola pangan yang terjadi pada masa lalu.

Pada masa kolonial, para sarjana Eropa telah menyigi faktor alam yang mengakibatkan beras tidak dapat dipisahkan dari konsumsi masyarakat jajahan. Seorang ahli vulkanologi, Alexander L. ter Braake, dalam publikasi penelitiannya, *Volcanology in the Netherlands Indies* (1945), menyatakan surplus beras di Jawa tidak dapat dipisahkan dari aktivitas vulkanis yang merupakan takdir Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari rangkaian cincin api dunia.

Aktivitas vulkanis berpengaruh besar dalam menyuburkan tanah pertanian. Tidak heran, selama berabad-abad hamparan hijau padi nan elok melekat dalam budaya masyarakat sejak masa kuno seperti terukir di relief kaki (Karmawibhangga) Candi Borobudur serta relief sawah

pada batu candi di Trowulan yang menunjukkan suasana perdesaan di Majapahit.

Ketersediaan beras serta harganya yang terjangkau oleh rakyat tidak hanya menjadi indikator kesejahteraan rakyat, tetapi juga keberhasilan politik pangan para penguasa Kerajaan Mataram sebagaimana yang tersirat dalam bagian Babad Tanah Jawi.

Masalah Beras

Pada masa paro kedua abad ke-19, sistem tanam paksa kolonial mengubah secara paksa sawah-sawah menjadi lahan tanaman komoditas seperti tebu dan tembakau. Di samping kelaparan, malnutrisi, dan kematian massal yang diderita rakyat karena terbatasnya produksi beras akibat konversi lahan, pemerintah kolonial terpaksa mengimpornya dari Birma (Myanmar) dan Muang Thai (Thailand) untuk memenuhi kebutuhan beras.

Ketika masa setelah kemerdekaan, Sukarno dalam buku Cindy Adams, *Bung Karno: Penjambung Lidah Rakyat Indonesia* (1966), menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap beras impor yang menurutnya merupakan pengaruh jangka panjang dari kolonialisme Belanda. Ujarnya: "sampai di hari kita berdiri sendiri bebas dari pengisapan imperialisme kita bergantung pada beras impor". Sikap Sukarno yang menyalahkan Belanda menyiratkan sejenis mental pascakolonial yang belum bisa "move on" dari stigma kolonialisme. Sebagai sebuah bangsa merdeka, tentu permasalahan pangan yang dihadapi In-

donesia adalah bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya.

Sebuah artikel bertajuk *Masalah Beras* di majalah *Star Weekly* edisi 1955 yang ditulis seorang anonim mengungkapkan masalah tingginya permintaan beras di pasar dalam negeri. Si penulis menuturkan, permasalahan pangan dihadapi Indonesia pada masa awal 1950-an yang disebabkan kekacauan perimbangan antara permintaan dan penawaran beras di pasaran dunia. Pada masa itu, produksi beras dalam negeri sangat rendah, sedangkan harga beras internasional luar biasa tinggi.

Sukarno pada masa kekuasaannya pernah mengadakan program diversifikasi pangan agar sehari-hari rakyat tidak bergantung pada konsumsi beras. Ini dilakukan karena produksi beras dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. Namun, yang dia deidealkan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Pada dasarnya, perekonomian Indonesia adalah perekonomian beras. Pada masa Sukarno, beras berfungsi sebagai pengganti uang (barter). Dan, pada masa awal kekuasaan Soeharto –sebelum swasembada beras 1984– beras dijadikan bagian dari kompensasi pegawai negeri.

Hantu Malthus?

Jika berkaca dari sejarah panjang perberasan Indonesia, setidaknya ada dua aspek yang menghasilkan kerawanan beras di negara ini. Pertama, kondisi ekosistem pangan kita yang telah banyak beralih

fungsi. Dalam hitungan Kementerian Pertanian, setiap tahun sekitar 100 ribu hektare lahan sawah tempat beras dihasilkan telah banyak beralih fungsi menjadi jalan, kawasan industri, dan perumahan.

Kedua, arah strategi pangan yang tidak pro lingkungan. Dulu Sukarno pernah mengutuk kolonialisme Belanda yang mengubah lahan-lahan pertanian dan hutan menjadi lahan-lahan tanaman komoditas perkebunan. Kini permasalahan yang dihadapi ketika pemerintah menyadari lahan-lahan pertanian tidak lagi mencukupi kebutuhan beras nasional untuk menyukupi jutaan rakyat adalah membuka hutan demi membangun proyek lumbung pangan nasional.

Indonesia tengah dihantui pemikiran suram Thomas Robert Malthus dalam *An Essay on the Principle of Population* (1798) bahwa reproduksi manusia selalu berkembang lebih cepat daripada produktivitas hasil pertanian. Jika selama ini bonus demografi dinilai sebagai modal masa depan Indonesia, ketika dihadapkan pada masalah krisis pangan seperti mahalnya harga beras sekarang ini, yang perlu diantisipasi adalah "petaka demografi" akibat menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Dan, krisis beras di negeri lumbung pangan yang dikaruniai tanah air subur dan makmur ini tentu sebuah ironi. Ironi karena ketika yang subur dan makmur tidak dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat, bukan kesejahteraan yang diperoleh, melainkan petaka yang menyengsarakan rakyat. (*)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	HUT ke-496 Kabupaten Indramayu
Date	6 Oktober 2023
Media	Fajar Cirebon
Page	4
Author	Agus Sugianto/ADV



Kementerian Pertanian

HUT ke-496 Kabupaten Indramayu

Mewujudkan Indramayu Tangguh, Ekonomi Tumbuh Menuju Ketahanan Pangan Mandiri



INDRAMAYU,

(FC).- Kabupaten Indramayu yang merupakan daerah di pesisir utara Pulau Jawa terus menjadi daerah yang menunjukkan geliat di berbagai bidang, mulai dari kehidupan social, kemasyarakatan, budaya, hingga ke perekonomiannya. Dengan semangat optimis yang terus terpacu di masyarakat Indramayu, asa mewujudkan Indramayu Tangguh menjadi semangat dan komitmen semua pihak di usia yang ke-496 ini.

Tidak mudah untuk bangkit setelah pandemi Covid-19 dimana semua sector terkena imbas dan terpuruk. Semangat bangkit itu bukan dari titik 0 (nol) melainkan dari titik (minus). Namun berkat semangat dan komitmen untuk bangkit, Kabupaten Indramayu bisa terus bertahan dan secara perlahan mulai bangkit sebagai wilayah yang penuh potensi dan pesona di pesisir Pulau Jawa.

Indramayu Tangguh dibuktikan dengan pertumbuhan



ekonomi yang signifikan, berdasarkan data Buku Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2023 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Indramayu berada pada angka -1,58 suatu kondisi yang sangat memprihatinkan namun harus tetap survive.

Pada tahun 2021, LPE Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan menjadi 0,58 suatu perbaikan keadaan yang mulai memunculkan optimis semua pihak. Selanjutnya pada tahun 2022 LPE Kabupaten Indramayu meningkat drastis menjadi 2,88 terjadi peningkatan 2,3 %. Kondisi ini menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya.

Meningkatkannya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu juga berbanding lurus dengan semakin menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada tahun 2020 mencapai 9,21 %.

Kemudian tahun 2021 menurun menjadi 8,3 %, dan pada tahun 2022 semakin menurun menjadi 6,49 %. Optimis bahwa angka pengangguran di Kabupaten Indramayu akan terus menurun

seiring dengan semakin meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Indramayu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu juga bisa dilihat secara langsung dari meningkatnya penanaman modal, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) angka penanaman modal pada tahun 2022 lalu mencapai Rp 1.8 triliun.

Selain dari penanaman modal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu juga dilihat dari sektor pangan, pada tahun 2021 Kabupaten Indramayu mampu memproduksi padi mencapai 1,3 juta ton gabah kering giling.

Kemudian pada tahun 2022 telah meningkat produksinya menjadi 1,49 juta ton gabah kering giling. Sementara pada tahun 2023 ini sampai periode bulan Agustus jumlah produksi padi mencapai 900 ribu ton gabah kering giling. Produksi padi Kabupaten Indramayu ini merupakan jumlah terbesar se-Indonesia.

Atas capaian itu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menganugerahi Kabupaten Indramayu sebagai Kabupaten dengan Produksi Padi terbesar di Indonesia.

Selain produksi padi, yang



juga menjadi andalan Kabupaten Indramayu yakni hasil perikanan, saat ini total produksi perikanan mencapai 526.841 ton yang terdiri dari produksi perikanan laut sebesar 175.261 ton dan perikanan budidaya sebesar

351.580 ton.

Dengan panjang pantai kurang lebih 147 kilometer, Kabupaten Indramayu menjadi daerah penghasil ikan tertinggi di Jawa Barat.

Di bawah kepemimpinan

Bupati Indramayu Nina Agustina, momentum Hari Jadi Indramayu ini diharapkan dapat menginspirasi semua pihak agar senantiasa memperkuat rasa persatuan dan semangat gotong royong untuk meningkatkan perekonomian dan mampu mandiri pada sektor ketahanan pangan, sehingga harapan dan cita-cita bersama menuju Indramayu Bermartabat dapat diwujudkan.

"Pada momentum Hari Jadi Kabupaten Indramayu ini, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam peningkatan pembangunan dan menjadikan hari jadi ke-496 ini sebagai refleksi terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indramayu," kata Nina.


Momentum Hari Jadi Kabupaten Indramayu juga terasa istimewa, pasalnya berbagai prestasi berhasil ditorehkan pada tahun ini oleh Bupati Indramayu Nina Agustina terutama dalam penguatan program ketahanan pangan diantaranya, *Mangala Karya Kencana* oleh BKKBN, penghargaan ini didapatkan karena kepedulian terhadap penguatan dan pemberdayaan keluarga terutama dalam program pencegahan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh.

Berikutnya yakni *Satyalancana Wira Karya*, yaitu suatu penghargaan pada bidang pembangunan pertanian yang diberikan Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Pertanian atas komitmen terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Indramayu.

Setelah itu penghargaan *Adhikarya Pratama Pembangunan Pertanian*, yakni penghargaan yang diserahkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Bupati Indramayu atas kontribusi dan keberhasilannya dalam penguatan kinerja langkah operasional peningkatan produksi pertanian yang dibuktikan dengan keberhasilan menghadapi perubahan iklim dan iklim ekstrem kekeringan (El-Nino). (Agus Sugianto/ADV)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN

Title	Isu Prabowo Mencekik Wamentan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Disway	
Page	6 Part 1	
Author	Djono W. Oesman	

Isu Prabowo Mencekik Wamentan

— Oleh: Djono W. Oesman —



INSTAGRAM@BUJARIESETIADI

MENHAN Prabowo Subianto (kiri) berfoto dengan Wamentan Harvick Hasnul Qolbi (tiga dari kiri), Menpora Dito Ariotedjo (dua dari kiri), dan Menkominfo Budi Arie Setiadi di sela-sela upacara Hari Keaktifan Pancasila, Minggu, 1 Oktober 2023.

Isu Menhan Prabowo Subianto menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi akhirnya dipolisikan Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer. "Sudah kami laporkan," ujarnya kepada pers Kamis, 5 Oktober 2023.

KABAR Prabowo menampar dan mencekik Harvick itu sudah menyebar sejak hampir sebulan lalu. Viral. Dan terus jadi gunjingan warganet. Prabowo sudah membantah. Namun, kabar tersebut terus beredar.

Pastinya, itu merugikan Prabowo yang akan maju pemilihan presiden. Itu memperkuat *framing* bahwa Prabowo sewenang-wenang. Sebelumnya, beredar video

Prabowo menggebrak meja di suatu pertemuan.


Dulunya (1998), Prabowo selaku Danjen Kopassus dituduh memerintahkan menculik para aktivis mahasiswa, yang sampai sekarang hilang.

Politikus PDIP yang juga aktivis '98 Budiman Sudjatmiko di YouTube, Rabu, 26 Juli 2023, mengatakan, Prabowo mengakui memang menculik para aktivis.

Namun, Prabowo mengaku sudah mengembalikan semua korban penculikan ke rumah masing-masing.

Menurut Budiman, Prabowo tidak mengetahui nasib korban penculikan yang hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah atau dinyatakan hilang.

Budiman: "Setidaknya ada 13 korban penculikan tahun 1997-1998 yang sampai saat ini masih hilang."

Title	Isu Prabowo Mencekik Wamentan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Disway	
Page	6 Part 2	
Author	Djono W. Oesman	

Dengan begitu, isu tampar dan cekik tersebut memperkuat citra bahwa Prabowo memang seperti itu.

Immanuel Ebenezer melaporkan tiga orang ke Polda Metro Jaya Kamis, 5 Oktober 2023. Terlapor adalah Pemimpin Redaksi Seward TV Alifurrahman, pemilik akun YouTube Kanal Anak Bangsa TV Rudi S. Kamri, dan Ade Kurniawan.

Dilaporkan atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2. Laporan sudah diterima Polda Metro Jaya.

Uniknya, itu sebelumnya sudah dilaporkan melawan Prabowo Mania 08 ke Bareskrim Polri. Tapi, hanya diterima polisi dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas). Bukan LP (laporan polisi) seperti laporan kedua di Polda Metro Jaya.

Immanuel: "Kami menuntut hukum harus ditegakkan secara berkeadilan. Tidak ada intervensi dan transparan. Di mata hukum, semua warga negara Indonesia sama. Tidak ada yang kebal terhadap hukum. Tidak ada yang superior di hadapan hukum. Karena itu, kami ingin kasus ini harus tuntas secara berkeadilan."

Awalnya, isu itu disebarkan *Seward TV* melalui akun YouTube mereka, Minggu, 17 September 2023.

Di situ narator *Seward*, Alifurrahman Asyari, menyatakan, ada seorang menteri aktif yang mencekik dan menampar seorang wakil menteri dalam suatu rapat kabinet.

Menurut Alifurrahman, keributan itu bermula saat sang menteri

marah dengan menteri yang atasan wamen tersebut, karena menteri si penampar merasa tidak dibantu dalam suatu program yang diamanahkan kepada mereka.

Namun, dalam rapat kabinet itu, sang menteri yang dimaksud menteri penampar tak hadir dalam rapat. Dengan demikian, menteri penampar melampiaskan kemarahan terhadap wamen. Maka, keributan itu jadi kekacauan sampai dileraikan menteri yang hadir.

Alifurrahman mengaku mendapatkan cerita itu dari salah seorang staf di istana kepresidenan yang katanya hadir di rapat tersebut. Hingga akhir video, Alifurrahman tak menyebut secara spesifik nama menteri yang menampar dan mencekik. Tapi, Alifurrahman mengatakan, menteri tersebut merupakan bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Spontan heboh. Publik langsung menyimpulkan, menteri penampar itu adalah Prabowo Subianto. Sedangkan, wamen yang ditampar dan dicekik adalah Wamen Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.

Isu itu sampai ditanyakan wartawan ke Presiden Jokowi. Ditanya wartawan pada Selasa, 19 September 2023, Jokowi mengatakan: "Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masak *nyekek*? Memang tahun politik itu banyak berita seperti itu."

Prabowo pun membantah. Menjawab pertanyaan mahasiswa. Di acara bertajuk *Tiga Bacapres Bicara Gagasan* yang disiarkan YouTube Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa, 19 September 2023, Prabowo mengatakan:

"Mungkin saya pernah ketemu sekali, sepiantas. Saya urusannya

selalu... kan saya menteri. Aku menteri, urusannya sama menteri. Jadi, pertemuan saya dengan Pak Yasin Limpo (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) hubungannya sangat baik."


Terlapor Alifurrahman sebagai jurnalis dalam YouTube soal itu tidak menyebut nama. Wartawan yang bertanya kepada Alifurrahman tentang sumber cerita tampar-cekik tidak dijawab Alifurrahman secara terperinci. Cuma disebutkan, staf di istana kepresidenan yang ada di rapat kabinet itu.

Berdasar kode etik jurnalistik, Alifurrahman melindungi identitas narasumber. Tapi, ia menyatakan begitu pastinya yakin narasumber memang ada dan benar bercerita begitu. Jika tidak, sebagai jurnalis, ia tidak mungkin memublikasi.

Identitas narasumber hanya diungkap jurnalis setelah publikasi itu jadi delik hukum. Alifurrahman wajib mengungkap identitas narasumber kepada penyidik. Juga, mengungkap secara terbuka di persidangan seandainya perkara itu kelak disidangkan.

Namun, isu itu diduga kuat terkait erat dengan politik. Terkait Pilpres 2024. Terkait pencitraan dan *black campaign* calon presiden. Seumpama benar itu terkait politik, penyelesaiannya tidak murni proses hukum. Pasti bercampur *deal-deal* politik juga. Baik di pra-penyidikan sampai di persidangan kelak.

Itu semua bakal terungkap jika penyidik menangani perkara tersebut. Dan, membuka secara transparan hasil penyidikan. Sebab, hasil penyidikan pasti juga diungkap terbuka di persidangan. Kita tunggu saja. (*)

Title	Kemarau Petani Padi Alih Tanam Bunga	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Nusa Bali	
Page	4	
Author	Mzk	

Kemarau, Petani Padi Alih Tanam Bunga

Debit sumber air yang menyusut menyulitkan menanam padi, sehingga para petani beralih menanam bunga.

SINGARAJA, NusaBali

Kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Buleleng, membuat sejumlah petani putar otak. Dengan kondisi debit sumber air yang mengecil, petani padi kini lebih banyak beralih ke tanaman yang lebih hemat air, salah satunya menanam bunga.

Salah satu petani, Kadek Karni, 46, warga Desa Petandakan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, yang melakukan peralihan pertanian. Ia yang awalnya mengandalkan pertanian padi kini memilih menanam bunga di lahan seluas 25 are miliknya. Kondisi itu, lantaran debit air di desa setempat me-

ngecil sejak bulan September lalu.

Ia mengakui, hal itu tidak hanya terjadi padanya. Bahkan kelompok tani setempat sudah melakukan kesepakatan untuk melaksanakan pengaliran air di kawasan itu. "Kondisi ini sudah berlangsung sejak awal September lalu. Kondisi air yang mengecil, kami terpaksa beralih ke tanaman bunga, agar lebih irit air," ujarnya, Kamis (5/10).

Karni menyebut, selain dirinya pemuliaan tanaman pertanian juga dialami oleh petani lainnya. Untuk meniasati sulitnya air, para petani setempat memilih menanam umbi-umbian hingga kacang hijau.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pertanian Kabupaten Buleleng Made Sumiarta mengatakan, pada tahun ini dari data pihaknya ada sekitar 200 hektare lahan pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan. Potensi kekeringan tersebut, tersebut ada di empat kecamatan. Diantaranya Kecamatan Seririt, Buleleng, Sawan




Petani padi di Desa Petandakan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, yang melakukan peralihan pertanian karena kemarau.

dan Kecamatan Sukasada. Hal itu, diduga terjadi akibat dampak fenomena El Nino.

"Ini akibat dampak El Nino belakangan ini. Lahan-lahan sudah mulai kering hingga krisis air. Petani kini harus menggilir air agar bisa menanam varietas tanaman," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, petani pun diimbau untuk melakukan pola yang tanam yang baik. Petani diminta menyesuaikan kondisi iklim dengan varietas tanaman yang akan ditanam.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi kekeringan di lahan pertanian, beberapa tahun ini Pemkab Buleleng telah mengusulkan bantuan ke Kementerian Pertanian RI dalam hal pengadaan mesin pompa air. Mesin ini nantinya diperuntukkan bagi lahan pertanian yang jauh dari sumber mata air. "Bantuan pengadaan mesin pompa selalu kita usulkan. Karena di Buleleng sendiri, banyak ada sumur sumur resapan di daerah pertanian," kata dia. © mzk

Title	Presiden Minta TNI Peka Persoalan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Batam Pos	
Page	1 Part 1	
Author	JP Group & Ryan Agung	



Bulog Perketat Pengawasan Distribusi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Presiden Minta TNI Peka Persoalan Pangan

Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG

JAKARTA (BP) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dalam peringatan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada Kamis (5/10). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menitipkan beberapa

pesan untuk TNI. Di antaranya agar seluruh jajaran TNI peka terhadap persoalan pangan yang kini sudah menjadi masalah global.

Pesan tersebut disampaikan oleh presiden di hadapan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan para prajuritnya. "Saya minta seluruh

Baca **PRESIDEN...** Hal 4

FOTO-FOTO: FEDRIK TARKELAN/JAWA POS
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan komandan upacara Mayjen TNI Choirul Anam memeriksa pasukan saat menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Kamis (5/10). Insert atas, prajurit wanita TNI tengah mengikuti parade alutsista; insert kanan, demonstrasi udara yang melibatkan pesawat TNI AU.

Title	Presiden Minta TNI Peka Persoalan Pangan
Date	6 Oktober 2023
Media	Rakyat Bengkulu
Page	11
Author	Jpg



Kementerian Pertanian

Presiden Minta TNI Peka Persoalan Pangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dalam peringatan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada Kamis (5/10). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menitikkan beberapa pesan untuk TNI. Diantaranya agar seluruh jajaran TNI peka terhadap persoalan pangan yang kini sudah menjadi masalah global.

Pesan tersebut disampaikan oleh presiden di hadapan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan para prajuritnya. "Saya minta seluruh anggota TNI punya kesadaran dan kepekaan terkait ini. Karena urusan pangan adalah urusan perut. Sangat penting dan penentu stabilitas bangsa," ungkap Jokowi. Dia menyebut, saat ini krisis pangan sudah terjadi di banyak negara.

Menurut Jokowi, salah satu sebab munculnya krisis pangan adalah perubahan iklim dan terganggunya rantai pasok dunia. Akibatnya 22 negara kini membatasi ekspor pangan, bahkan ada yang menghentikan ekspor pangan. Karena itu, presiden mengingatkan TNI untuk peka terhadap persoalan pangan. Sehingga Indonesia bisa melalui krisis yang sedang terjadi tersebut.

Panglima TNI memastikan, dirinya akan menindaklanjuti pesan yang disampaikan oleh presiden. Dia pun menyadari bahwa persoalan pangan sudah menjadi masalah global. "Tentunya TNI harus peka," ucap Laksamana Yudo. Meski sudah memiliki dan menjalankan berbagai program terkait pangan, dia menyatakan, pihaknya bakal lebih giat lagi melaksanakan program tersebut.

Saat ini, TNI sudah punya Gerakan Nasional Ketahanan Pangan. Program itu berjalan di seluruh jajaran. Baik di TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Mereka memanfaatkan lahan-lahan tidur atau lahan milik TNI yang masih kosong. Yudo menyebut, dia sudah menggerakkan jajarannya untuk melaksanakan program tersebut. Tujuannya tidak lain membantu ketahanan pangan.

Dalam waktu dekat, lanjut Yudo, gerakan itu bakal dimaksimalkan lagi. "Nanti saya akan sesuaikan jadwal bapak presiden, tanggal 17 Oktober akan kami gerakan seluruh Indonesia," bebernya. Yudo memastikan, instansinya akan terus mengupayakan yang terbaik demi membantu masyarakat. Tidak terkecuali dalam mengatasi krisis pangan global.

Kemarin Direktur Utama Perum

Bulog Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan distribusi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sedang berjalan. Sebab, Buwas menengarai ada praktik kecurangan oknum yang berupaya mengambil keuntungan sehingga harga beras tak kunjung turun.

Beberapa temuan yang didapat, sambung Buwas, adalah pengoplosan beras Bulog, sampai mengganti kemasan beras Bulog dengan karung beras merek lokal premium. "Beras Bulog dimasukkan ke packaging merek-merek mereka untuk disuplai dan dijual dengan harga tinggi premium," ujar Buwas.

Mengetahui hukuman atau sanksi yang bakal diberikan, Bulog akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Menurut Buwas, pelaku bisa dijerat hukum pidana kasus penipuan dan penyalahgunaan beras milik negara. "Indikasi penyimpangan itu selalu ada karena ada peluang atau kesempatannya," ucapnya.

Ikut menegaskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa distribusi beras SPHP akan berjalan seiring dengan pengawasan dan penegakan hukum. "Kita libatkan semua, satgas, pemma, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," ujar Erick.

Terkait potensi kecurangan beras, Erick menegaskan bahwa data produksi dan impor beras Indonesia harus satu data. Jika berjalan sendiri-sendiri, menurut Erick hal itu seringkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat. "Jadi kami ingin mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani, pemainnya nanti begitu-begitu saja, selalu ingin cari uang cepat. Nah, ini harus diberantas," beber Erick.

Terpisah, Pakar Kebijakan Agribisnis Departemen Agribisnis IPB Feryanto menuturkan tidak melihat adanya potensi panic buying akibat stok beras di Indonesia. Menurutnya ketersediaan beras relatif masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Walaupun dengan kenaikan harga, karena panen terganggu," katanya.

Sementara itu untuk masyarakat menengah ke atas dapat mengalihkan ke beras medium dan premium lainnya. Dia mengatakan yang perlu dijaga pemerintah adalah



HUT TNI: Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan komandan upacara Mayjen TNI Choirul Anam memeriksa pasukan saat menjadi inspektur upacara HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

masyarakat miskin. Caranya dengan memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin. Agar pengeluaran mereka terjaga dan tidak jatuh lebih miskin lagi.

Pria yang akrab disapa Fery itu mengatakan, banyak kajian dan diskusi yang menyebutkan bahwa el nino memberikan dampak kepada produksi pertanian, terutama pangan beras. Dia mengatakan kemarau kering yang berkepanjangan tahun ini berdampak curah hujan yang rendah. Atau bahkan hampir tidak ada di sebagian wilayah sentra pangan.

Kondisi itu menyebabkan petani tidak bisa menanam dan memanen tanamannya. Sehingga produksi pangan tidak sesuai target. Menurut data Kementan, ada potensi kehilangan produksi beras akibat el nino setara 1,2 juta ton. Namun angka ini, dinilai masih wajar dalam artian dari target produksi nasional sebesar 30 juta ton.

Kemudian BPS mencatat bahwa produksi beras selama periode Januari-Oktober 2023 ditaksir mencapai 27,878 juta ton. "Yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga, akibat penurunan stok ini, yang mudah dipermainkan oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan," jelasnya.

Namun Fery menegaskan kondisi beras saat ini tidak akan menyebabkan terjadi kelangkaan, seperti pada kasus minyak goreng sebelumnya. Disamping itu, pasokan pangan non beras sebagai sumber karbohidrat di Indonesia ada banyak. Sehingga masyarakat akan melakukan mitigasi mandiri untuk mengantisipasi jika terjadi

kenaikan harga pangan, terutama masyarakat pedesaan.

Di bagian lain Satgas Pangan Polri berupaya membantu pemerintah mengecek stok, distribusi hingga harga beras. Hasilnya, diketahui masih ada sejumlah daerah yang berhasil panen raya. Kondisi itu memungkinkan untuk mengisi kecurangan stok beras.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hemawan menerangkan, Satgas Pangan telah mengecek ke seluruh Indonesia khususnya kondisi ketersediaan beras. Dari petani, penggilingan, pasar dan konsumen. "Ternyata masih ada panen raya di berbagai daerah, salah satunya Kalimantan Selatan," jelasnya.

Karena itu Satgas Pangan mendorong agar pemerintah mengambil beras masyarakat yang mengalami panen raya. Sehingga, bisa memenuhi kuantitas dari kebutuhan beras nasional. "Saat ini kebutuhan tiap tahun mencapai 31 juta ton, kalau dipelajari mendalam dengan panen masyarakat ini cukup," jelasnya.

Memang terdapat kenaikan harga beras yang kemudian dirispon dengan impor beras mencapai 2 juta ton. Saat ini 1,7 juta ton telah masuk, masih ada 300 ribu ton yang akan masuk ke Indonesia. "Ini harus dibedakan dengan panen raya, impor untuk kualitas premium karena pecahan di bawah 15 persen," terangnya.

Dia mengatakan, Satgas Pangan juga sedang memantau kemungkinan terjadinya pidana dengan mengganti kemasan beras medium menjadi premium. Satgas Pangan daerah dikerahkan untuk

mendeteksi kemungkinan pidana tersebut. "Kalau sebelumnya pernah kasus semacam itu terjadi di Bogor dan Bekasi. Masyarakat rugi karena beli harga premium, mendapat yang medium," ujarnya.

Saat ini problem utamanya adalah dampak dari El Nino. Yang menurunkan jumlah produksi beras nasional dari lima persen hingga 15 persen. Untuk kondisi ini Satgas Pangan bersama stakeholder berupaya untuk mencari solusinya. "Ini bisa diatasi bersama," paparnya.

Sementara itu, Sesuai janjinya, dalam peringatan HUT ke-78, TNI menunjukkan kekuatan mereka kepada masyarakat. Berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) mereka tunjukkan melalui parade dan defile. Tidak hanya itu, TNI juga menunjukkan kemampuan para prajurit tiga mata dalam menjalankan tugas. Diantaranya dengan atraksi terjun payung dan demonstrasi udara.

Presiden Jokowi yang turut melihat langsung unjuk kemampuan itu sempat mengingatkan agar TNI memperhatikan belanja alutsista. Bukan tidak boleh, presiden ingin anggaran yang diberikan oleh negara digunakan sebaik-baiknya untuk membeli alutsista yang betul-betul diperlukan. Pesan itu juga ditangkap oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan seluruh jajarannya.

Mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I tersebut menyatakan bahwa pengadaan alutsista memang selalu dilakukan berdasar skala prioritas. Pihaknya juga menyesuaikan diri dengan ketersediaan anggaran. "Mod-

ernisasi (alutsista) iya pasti akan dilaksanakan. Tetapi, sesuai prioritas tadi. Tentunya nggak bisa kami langsung modernisasi secara keseluruhan," imbuhnya.

Saat ini, kata Yudo, TNI melakukan modernisasi alutsista secara bertahap. Itu dilakukan oleh seluruh jajaran TNI di tiga mata. Semua kepalastafm melaksanakan modernisasi alutsista dalam rangka pembinaan kemampuan dengan menitikberatkan kebutuhan. "pembinaan alutsistanya modernisasi, tapi tadi sesuai prioritas pelaksanaannya. Sehingga anggaran yang diterima tepat sasaran," ujarnya.

Ombudsman meminta HET beras segera dicabut untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi saat ini. Bulog juga harus segera menggelontorkan stoknya lewat operasi pasar. Yang menasar langsung ke konsumen. Bukan ke pedagang, apalagi pasar induk.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, kelangkaan stok yang saat ini terjadi memang disebabkan oleh banyak sebab. Salah satunya musim kemarau di mana stok beras dipengkilan memang menipis.

"Tapi ada hal lain. Soal gabah yang langka di penggilangan," paparnya kepada Jawa Pos kemarin. Saat ini terjadi perubahan gabah-an. Pergilangan menengah dan besar. Mereka berebut di tingkat petani, akibatnya beberapa daerah saat ini stok gabahnya menipis. Akibat diborong oleh penggilangan besar. Dampaknya, harga beras mahal.


Soal harga beras, Yeka menyebut, kenaikan harga di pasaran sebenarnya tidak membuat masyarakat panik. Sebab, sejak 2017 sebenarnya, harga beras rata-rata di pasaran sudah lebih tinggi dari HET. "Masalahnya saat ini, udah harga mahal, berasnya juga terbatas," paparnya.

Yeka mengatakan, sejak dua minggu lalu telah menyarankan pemerintah terkait masalah beras mahal dan langka. Salah satunya dengan penerapan HET gabah. Agar di tingkat produsen beras atau penggilangan bisa diatur. Sehingga harga beras akan menyesuaikan.

Sementara itu distribusi beras, Ombudsman menyarankan agar Bulog mengeluarkan cadangan pangannya untuk operasi pasar. Dan operasi pasar itu langsung menasar ke masyarakat bukan ke pedagang. Agar masyarakat bisa terbantu terkait pembelian beras dengan harga di bawah HET. "Kalau dijual ke pasar dibeli konsumen bakal lebih mahal," paparnya. (jpp)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMANTAN

Title	Tekankan Pentingnya Manajemen Finansial	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Kedaulatan Rakyat	
Page	4	
Author	Ewi	

KEMENTAN BINA 30 PETANI MILENIAL Tekankan Pentingnya Manajemen Finansial

WONOSARI (KR) - Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) mengapresiasi berkembangnya petani milenial yang ada di kabupaten Gunungkidul. Semakin banyak petani milenial akan menjamin terjadi regenerasi petani yang tetap akan menggarap lahan pertanian yang ada dan mengamankan swasembada pangan. Keberlangsungan penggarapan lahan pertanian, dijamin dengan meningkatnya petani milenial dan bertambahnya petani-petani muda. Semangat petani muda dan petani milenial ini wajib diapresiasi dan perlu terus mendapatkan pembinaan.

"Antara lain perlunya latihan pengelolaan finansial, kadang banyak petani milenial kurang kuat dalam pengelolaan finansial," kata Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) RI




KR-Endar Widodo

Ida Widi Arsanti menyampaikan sambutan di ruang Rapat Handayani Pemkab Gunungkidul.

Ida Widi Arsanti dalam arahnya di ruang rapat Handayani Pemkab Gunungkidul, Rabu (4/10).

Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto SKom MSi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Rismiyadi SP MSi, sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya. Wakil Bupati Heri Susanto berharap pembinaan dari kementan dapat berlangsung secara periodik, sehingga dapat terus meningkatkan ketrampilan dan kecapakan petani dan juga memberikan fasilitas

petani muda dan milenial menuju pertanian moderen. Dijelaskan oleh Ida Widi Arsanti selaku Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, program di 2025-2029 ada program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Scaling-Up Intervention (YESS-SI). Program ini menjadi pusat pelayanan pengembangan usaha di sektor pertanian. "30 Peserta dari Petani Milenial d Gunungkidul ini akan berperan sebagai fasilitator muda untuk mensukseskan program YESS-SI," tambahnya. **(Ewi)**


Title	Beras Mahal Perluas Sawah	
Date	6 Oktober 2023	
Media	Kaltim Post	
Page	13 Part 1	
Author	Dee/JPG/rom/k25	

Beras Mahal, Perluas Sawah

RISIKO kekeringan, kesusahan air bersih, gagal panen, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi sebagai efek fenomena el nino. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dampak-dampak tersebut bisa teratasi.

Berdasar keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak el nino terjadi pada September lalu.

Baca
BERAS
...Hal 19 ■

Title	Beras Mahal Perluas Sawah	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Kaltim Post	
Page	13 Part 2	
Author	Dee/JPG/rom/k25	

BERAS

Sambungan dari hal 13

Namun, dari pengamatan satelit, Oktober ini masih masa puncak. Pada November, dampaknya diprediksi akan berkurang karena sudah memasuki masa transisi ke musim hujan. "El nino masih masuk moderat sampai akhir tahun dan berahir di Maret," papar Kepala BMKG Dwikorita Kamawati.

Indonesia bagian selatan khatulistiwa, menurut Dwikorita, akan terdampak paling lama. Saat di beberapa daerah di utara khatulistiwa sudah hujan, wilayah di selatan khatulistiwa belum terbentuk awan. Sehingga, hujan belum akan turun. "Kalau diprediksi, baru awal November di Jawa, Nusa Tenggara,

sampai Papua (yang terbentuk awan)," terang dia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, hingga saat ini 60 hingga 80 persen embung masih efektif untuk mengairi pertanian. Di sisi lain, karhutla masih terjadi. Hingga 2 Oktober, terpantau ada 6.659 hot spot. Sebanyak 80 persen-nya berkecang menjadi fire spot atau titik api. "Perkiraan saya, dengan situasi di September dan Oktober, akan bertambah," katanya.

Siti mengungkapkan, sejak 28 September tim pendali karhutla berjibaku mengendalikan titik api di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Riau dan Jambi juga termasuk yang dimonitor. Siti menjamin hingga kini tidak ada asap yang menyeberang ke negara tetangga, seperti Malaysia. Koordinator Laboratorium Te-

knologi Modifikasi Cuaca (TMC) BRIN Budi Harsoyo menjelaskan, misi TMC saat ini fokus untuk mengatasi karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Belum ada rencana untuk wilayah Jawa. "Saat ini (hujan buatan) paralel sedang beroperasi di empat provinsi," katanya. Empat provinsi itu adalah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Terkait produktivitas pangan, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan. "Langkah penanaman yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah," ucap dia.

Di antaranya percepatan tanam pada wilayah yang masih terdapat sumber air. Kemudian, menanam komoditas tanaman pangan yang lebih hemat air (paditan kering),

varietas umur pendek, dan menanam jagung atau kacang-kacangan. Selain itu, dilakukan normalisasi saluran untuk drainase dan menyiapkan sumber air alternatif.

Secara khusus, upaya menekan dampak el nino dilakukan melalui Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino. Gerakan nasional itu berupa kegiatan tambah luas tanam 500 ribu hektare di 10 provinsi dan 100 kabupaten. "Progresnya terus kami monitor dengan melakukan koordinasi antara pusat dan daerah serta terjun langsung ke lapangan," jelasnya.

Plt Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro menambahkan, upaya lain untuk penanganan kekeringan akibat fenomena el nino adalah pengadaan sarana pompa air. Kemudian, melakukan Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

(DPI), yakni banjir atau kekeringan, di lahan seluas 4.250 hektare. Sampai saat ini bantuan pompa air telah direalisasikan ke sebelas provinsi dan dijadikan stok pada brigade perlindungan tanaman.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan, pemerintah berupaya mengatasi harga beras yang masih melambung akibat fenomena el nino. Termasuk untuk mencapai cadangan beras minimal 2 juta ton.

Menurut Tito, ada tujuh provinsi yang masih memproduksi beras. Selain itu, Presiden Jokowi telah mengasikan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk impor beras.

"Sehingga, dicapai stok minimal 2 juta agar aman. Setelah itu digelontorkan ke seluruh daerah. Kemudian, kami berusaha setelah (impor) masuk digelontorkan, jan-


gan sampai ditahan. Kalau ditahan akan terjadi kelangkaan," tuturnya.

Tito juga mendorong perlu adanya diversifikasi pangan. Hal itu menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi kenaikan harga beras yang belum ada tanda-tanda turun. "Tolong ditekan betul, diversifikasi pangan. Jadi, tidak hanya mengandalkan beras sebagai makanan pokok, tapi juga karbo-karbo yang lain," imbuhnya.

Mantan Kapolri itu pun mengajak masyarakat mulai mengonsumsi asupan karbohidrat alternatif. Dengan demikian, permintaan terhadap beras dapat berkurang. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah Indonesia Timur yang menyukai sagu sebagai bahan pangan utama. Selain sagu, ada banyak bahan pangan pokok yang digemari masyarakat, seperti keladi, talas, dan ubi jalar. (dee/JPG/rom/k15)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Mulai Hari Ini KPM Diberi Beras 10 Kg	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Kaltim Post	
Page	17	
Author	Ari Arief	

BERAS CPP:
Kepala Dinas
Ketahanan
Pangan PPU
Mulyono
menyerahkan
beras CPP
tahap pertama
kepada KPM,
September
2023. Bantuan
beras tahap
kedua dibagikan
mulai hari ini.



ARI/KP

Mulai Hari Ini KPM Diberi Beras 10 Kg

DINAS Ketahanan Pangan Penajam Paser Utara (PPU) mendistribusikan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) tahap kedua Oktober 2023, yang diawali pem-

bagiannya mulai Jumat, 6 Oktober 2023, hari ini, total 98.990 kilogram kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 9.889 orang. "Atau masing-masing KPM menerima bantuan beras CPP sebanyak 10 kilogram," kata Mulyono, kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU, Kamis (5/10).

Dia merinci, pendistribusian beras CPP itu diberikan pada Jumat, hari ini, kepada KPM 3.694 orang di Kecamatan Penajam

dengan total beras 36.940 kilogram. Kemudian, Senin, 9 Oktober 2023 di Kecamatan Babulu kepada 2.889 KPM dengan jumlah beras yang disalurkan 28.890 kilogram. Lalu, pada hari yang sama pembagian beras 9.760 kilogram diberikan kepada 976 KPM di Kecamatan Babulu dan Selasa, 10 Oktober 2023 penyaluran beras ini diberikan kepada 2.340 PKM di Kecamatan Sepaku dengan total 23.400 kilogram.

"Jumlah beras yang kami salurkan pada tahap kedua ini sama dengan penyaluran beras CPP tahap pertama awal September 2023 lalu," kata Mulyono.

Tak hanya itu, dinasnyapun memprogramkan gerakan pasar murah kerja sama Dinas Pangan Tanaman Pangan Kaltim, Senin (16/10). Kegiatan ini, kata dia, akan diisi usaha mikro kecil menengah (UMKM), gelar pangan murah dan dirangkai Zoom Meeting nasional

untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. "Acara ini melibatkan pejabat (pj) gubernur Kaltim, dan Pj Bupati PPU Makmur Marbun yang juga diisi kegiatan menyosialisasikan penganekaragaman pangan lokal, atau diversifikasi pangan lokal, yaitu beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA," ujarnya. (far/ki15)

ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id

Title	Poktan Diusulkan Ikut BPJS Ketenagakerjaan
Date	6 Oktober 2023
Media	Solopos
Page	5
Author	Tri Rahayu



Kementerian Pertanian



Ekspos/Tri Rahayu

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati memukul gong saat pembukaan *KTNA Sragen The Experience 2023* di Gedung SMS Sragen, Kamis (5/10/2023).

KTNA SRAGEN THE EXPORIENCE 2023

Poktan Diusulkan Ikut BPJS Ketenagakerjaan

TRI RAHAYU

SRAGEN — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen meminta kepada Bupati Sragen agar seluruh ketua kelompok tani (poktan) di Sragen diikuti dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan premi Rp16.800 per bulan. Selain itu, KTNA juga mendesak kepada Bupati Sragen agar setiap poktan memiliki alat ukur tanah yang pengadaannya dari pos ketahanan pangan dana desa (DD).

Desakan itu disampaikan Ketua KTNA Sragen, Suratno, di hadapan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan pejabat Kementerian Pertanian dan pengurus KTNA nasional serta ratusan petani di Sragen dalam pembukaan *KTNA Sragen The Experience 2023* di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Kamis (5/10/2023).

"Harapan kami setiap poktan bisa menguji tanah masing-masing sehingga bisa tepat olah tanah, tepat tanam, dan pemupukan. Harga alat ukur tanah itu Rp1,5 juta per unit. Kalau satu desa itu ada 10 poktan maka per desa hanya butuh anggaran Rp15 juta," ujar Suratno.

Sementara permintaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan itu untuk menjamin

keselamatan petani sebagai penyangga pangan di Sragen. Dia menyampaikan KTNA sudah memulai dengan mengikutsertakan 632 petani dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan itu, Suratno juga melaporkan produksi padi di Sragen pada 2022 turun karena kondisi tanah yang mengindikasikan kekurangan zat-zat yang dibutuhkan tanah. Ia menyebut hal ini disebabkan minimnya subsidi pupuk.

Suratno mengaku sudah berkiriman surat kepada Presiden dengan tembusan Kementerian Pertanian dan Gubernur Jawa Tengah hingga Bupati agar kebutuhan pupuk bersubsidi dipenuhi.

"Kami juga sudah membuat analisis usaha tani dengan asumsi tanpa pupuk bersubsidi membutuhkan biaya produksi Rp34 juta per hektare. Bila asumsi produktivitas 6 ton per hektare maka harga gabah kering panen Rp5.625/kg baru impas dengan biaya produksinya. Hari ini, harga GKP Rp7.200/kg sehingga petani tanpa pupuk bersubsidi pun sudah bisa menikmati hasilnya. Kami meminta harga GKP ini dipertahankan supaya petani sejahtera," ujarnya.

Menanggapi itu, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyatakan kesiapannya memenuhi permintaan KTNA asal mau menurutinya dan bersinergi dengan Pemkab. Yuni, sapaannya, juga mengaku senang bertemu petani dan mengapresiasi KTNA yang menggelar ekspso secara swadaya.

"Tema yang diangkat KTNA ini memang


relevan dengan kondisi Indonesia. Kondisi sekarang negara-negara sedang perang memperebutkan pangan. Indonesia sekarang jumlah penduduknya sudah 270 juta jiwa dengan karakteristik masyarakat dan luas wilayah yang besar, maka kedaulatan pangan menjadi penting," ujar Yuni.

Lebih jauh Bupati juga curhat soal status Sragen yang menjadi penyangga pangan terbesar kedua di Jateng setelah Cilacap dan kesembilan secara nasional, namun tidak mendapatkan hak istimewa. Sragen juga disebutkan dipaksa menyediakan lahan sawah yang dilindungi (LSD) sampai puluhan ribu hektare dan tidak boleh beralih fungsi, bahkan lahan tidak subur pun masuk LSD.

Jika dihitung-hitung, sambungnya, Sragen lebih menguntungkan jadi kabupaten industri ketimbang agraris. Jadi, jika ingin Sragen terus jadi kabupaten agraris maka pemerintah pusat perlu menunjukkan komitmennya pada Sragen.

Bupati berharap keinginannya dan petani Sragen didengarkan pemerintah pusat lewat pejabat Kementerian Pertanian dan KTNA nasional yang hadir. "Harusnya pemerintah pusat itu bisa melihat misalnya 10 kabupaten penyangga pangan nasional apa pun permintaannya dicukupi. Mudah-mudahan ini didengar pusat. Nanti hasil diskusi di KTNA ekspso ini disampaikan ke Presiden dan ditambahkan adanya tambahan pupuk subsidi untuk Sragen sebagai *privilege* kabupaten agraris," jelasnya. **☎**

Title	BEEF Bakal Impor 15.000 Impor Sapi di 2024
Date	6 Oktober 2023
Media	Neraca
Page	4
Author	Bani




BEEF Bakal Impor 15.000 Impor Sapi di 2024

Kejar pertumbuhan bisnisnya di pengolahan daging, PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF) menargetkan impor sapi hidup sebanyak 15.000 ekor sepanjang 2024 mendatang dengan nilai pembelian maksimal Rp20 juta per ekor dari Australia.

Direktur Utama Estetika Tata Tiara, Imam Subowo mengatakan, target impor sapi hidup dari Australia harus sejalan dengan kemampuan penjualan BEEF. Hingga akhir tahun 2023, BEEF mendapatkan izin impor sebanyak 12.000, sementara untuk tahun depan masih harus mendapatkan izin pemerintah. "Untuk tahun depan target kami per bulan harus dapat menjual 1.000 sapi hidup, maka kami dapat mengimpor sapi hidup 1.000 ekor pula, target kami untuk total impor sebanyak 14.000 hingga 15.000 ekor sapi hidup," ujarnya.

Terkait dengan target impor tersebut, BEEF mengaku sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar rupiah. Pasalnya, nilai tukar rupiah akan sangat mempengaruhi biaya impor. ● bani

Title	BPS: Sumsel Alami Inflasi 0.37 Persen pada September 2023	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

BPS: Sumsel Alami Inflasi 0,37 Persen pada September 2023

NERACA

Palembang, Sumsel - Badan Pusat Statistik mencatat wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami inflasi bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,37 persen pada periode September 2023. "Inflasi 0,37 persen itu lebih tinggi dari periode sebelumnya yang mengalami deflasi 0,04 persen. Sementara, inflasi tahunan (year on year/-yoy) sebesar 2,28 persen," kata Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto di Palembang, Sumsel, dikutip Antara, kemarin.

Ia menjelaskan kurang lebih 400 komoditas yang dipantau setiap bulannya terdapat 10 komoditas utama yang memberikan andil inflasi. "Adapun komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, yaitu beras yang mengalami perubahan harga mencapai 11,96 persen dan andil mencapai 0,488," jelasnya.


Lalu, diikuti oleh komoditas rokok kretek filter dengan perubahan harga 0,87 persen dengan andil 0,016 dan komoditas daging ayam ras yang mengalami kenaikan sebesar 0,89 persen dan andil 0,016.

"Untuk komoditas nonmakan penyumbang inflasi tertinggi dari komoditas bensin yang memberikan andil sebesar 0,034," ujarnya. Ia mengungkapkan komoditas beras sebagai penyumbang inflasi tertinggi disebabkan oleh naiknya harga beras sejak satu bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pantauan harga di Pasar KM 5 Palembang 2023 per 2 Oktober 2023 harga beras masih tinggi atau berada di atas penetapan harga eceran tertinggi (HET). "Harga beras masih cukup tinggi, yaitu mulai dari Rp12.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.500 per kilogram untuk beras premium," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setda Pemprov Sumsel Hengky Putrawan mengatakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga beras adalah dengan memastikan penyaluran beras SPHP tidak terkendala. "Karena beras SPHP bertujuan untuk menstabilkan harga dan menekan laju inflasi. Jadi kita pantau penyalurannya jangan sampai di lapangan terkendala dan ikut mahal," jelasnya.

Pihaknya juga terus mengencarkan kegiatan operasi pasar baik di Kota Palembang maupun di 16 kabupaten kota lainnya dan dilaksanakan rutin hampir setiap harinya. ● ant

Title	Bulog Jabar Salurkan 124.479 Ton Beras Bantuan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Bulog Jabar Salurkan 124.479 Ton Beras Bantuan Pangan

NERACA

Bandung - Perum Bulog Wilayah Jawa Barat menyalurkan beras Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 27 kabupaten/kota di wilayah itu sebanyak 124.479 ton beras.

"Pada program bantuan pangan pemerintah selama tiga bulan, Bulog Jabar ditugaskan untuk menyalurkan 124.479 ton kepada 4.149.374 keluarga penerima manfaat (KPM) atau 41.493 ton beras per bulan," kata Pimpinan Perum Bulog Jabar, M. Attar Rizal di Bandung, Kamis (5/10).

Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses distribusi untuk menyalurkan Beras Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) selama tiga bulan program berlangsung, yakni bulan September hingga November 2023 kepada seluruh kabupaten/kota di Jabar.


"Sedangkan untuk proses distribusi di bulan September telah mencapai 100 persen dan kini sudah memasuki penyaluran bulan Oktober," katanya.

Attar menjelaskan sebelum disalurkan kepada KPM, beras bantuan pangan tersebut telah melewati proses pengecekan kualitas yang ketat oleh PT Pos Indonesia Regional 3 untuk membantu kelancaran dan keamanan dalam proses pendistribusian beras CPP.

"Perum Bulog Kanwil Jabar berkomitmen untuk menjaga kualitas beras Bantuan Pangan yang disalurkan kepada masyarakat untuk memastikan distribusi berjalan lancar, termasuk memastikan kualitas beras dalam kondisi terjaga," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengimbau kepada masyarakat untuk melapor jika menemukan atau mendapatkan beras yang tidak layak konsumsi.

"Masyarakat silahkan mengecek kondisi berasnya, apabila ada beras yang tidak sesuai dengan standar kualitas beras medium, segera laporkan akan segera kita tukar pada saat itu juga," kata Attar. ● ant

Title	Ditjen Perkebunan Terjun Padamkan Kebakaran Lahan di Kalsel	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Agus/gro	

Ditjen Perkebunan Terjun Padamkan Kebakaran Lahan di Kalsel

NERACA

Banjarbaru-Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan ikut dalam mempercepat pemadaman kebakaran lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel) agar tidak meluas ke lahan perkebunan kelapa sawit.

Hingga saat ini, terdapat 7.000 hektar (ha) lahan gambut yang mengalami kebakaran, belum merambat ke lahan sawit.

"Kami (Ditjen Perkebunan) bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi Kalsel, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, - red) melakukan kegiatan pemadaman kebakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan," kata Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah saat meninjau sekaligus melakukan pemadaman kebakaran lahan di Desa Syamsudin Noer, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Andi menyebutkan dalam penanganan kebakaran lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi leading sektornya.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan memberikan dukungan agar kebakaran cepat

padam dan tidak merambat lahan perkebunan sawit.

"Oleh karena itu, dalam kegiatan ini kami memberikan bantuan 10 unit pompa air untuk mempercepat pemadaman kebakaran lahan. Perkebunan sawit rakyat harus sedini mungkin kita selamatkan dari kebakaran ini, mengingat sawit provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu penyumbang perekonomian," sebut Andi.

Andi menambahkan dalam pengendalian kebakaran lahan sebagai dampak terjadi El Nino ini, pihaknya terus mengingatkan kepada seluruh stakeholder perkebunan untuk tetap waspada dan dapat mempersiapkan upaya-upaya pencegahan atau antisipasi.

Dengan begitu, hasil produksi atau hasil panen perkebunan tetap terjaga mutu dan kualitasnya, serta ketersediaan bahan baku aman terkendali.

"Pada tahun 2022 dan 2023, kami telah memberikan bantuan sarana berupa 431 unit pompa pemadam kebakaran untuk Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten serta KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang berada di daerah prioritas rawan terjadinya Karhutla, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan

Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat," ungkap Andi.

Lebih lanjut Andi menjelaskan pompa pemadam kebakaran telah didistribusikan dari Direktorat Jenderal Perkebunan kepada 48 unit kerja Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten serta 23 KTPA. Bantuan sarana pompa pemadam tersebut saat ini telah digunakan untuk melakukan pemadaman oleh petugas dinas perkebunan ataupun KTPA dalam membantu Satgas Karhutla.

"Dalam upaya mencegah kebakaran di lahan perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, terus memantau dan memperbarui informasi potensi kebakaran. Salah satunya melalui aplikasi digital SiKARLA PADAM berbasis web," terang Andi.

"Strategi Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan-Pastikan Api dan Asap Menghilang (SiKARLA PADAM) merupakan salah satu sistem informasi deteksi titik panas (hotspot) di lahan perkebunan," tambah Andi.

Tidak hanya itu, sebelumnya Andi juga mengatakan kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Perkebunan

saat ini berupaya memperbaiki tanaman perkebunan yang telah tua/rusak/tidak menghasilkan dengan penggantian tanaman melalui kegiatan peremajaan ataupun rehabilitasi.


Sesuai data statistik perkebunan tahun 2022, tercatat hampir 30 persen dari total luas perkebunan di Indonesia dalam kondisi tua/rusak/tidak menghasilkan.

"Sehingga jika kondisi tersebut dibiarkan akan mempengaruhi produksi perkebunan kita bahkan berdampak juga pada penurunan devisa negara," kata Andi.

Andi mengatakan investasi perkebunan merupakan investasi jangka panjang, untuk itu dalam pelaksanaannya perlu disiapkan dengan sangat baik. Salah satu faktor utama dan paling penting adalah pemilihan benih.

Direktorat Jenderal Perkebunan sangat serius dalam menyiapkan benih tanaman perkebunan bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing industri perkebunan.


"Bentuk keseriusan tersebut diwujudkan melalui sistem penyediaan, pengawasan dan peredaran benih melalui Bank Benih Perkebunan (Babe Bun)," kata Andi. ● agus/gro

Title	MENANAM BIBIT BAWANG MERAH BANTUAN PEMERINTAH	
Date	6 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Neraca/Antarafoto/Irwansyah Putra/tom	



NERACA/Antarafoto/Irwansyah Putra/tom

MENANAM BIBIT BAWANG MERAH BANTUAN PEMERINTAH : Petani merawat dan menyiram tanaman bawang merah bantuan Pemerintah Aceh di Aceh Besar, Aceh, Kamis (5/10/2023). Bantuan bibit bawang merah kepada kelompok tani yang disalurkan Pemerintah sebagai upaya mewujudkan program ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Title	Pembatasan Pembelian Beras untuk Pemerataan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	1	
Author	Bari/mohar/fha	

PENGUSAHA RITEL MEMBENARKAN:

Pembatasan Pembelian Beras untuk Pemerataan

Jakarta-Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan pembelian beras di toko ritel seperti Super Indo dan Alfamart. Sementara itu, eksekutif *Development and Islamic Studies* (IDEAS) menilai langkah ritel membatasi pembelian beras menunjukkan pasokan beras kian terbatas, karena terbatasnya produksi domestik.

■ NERACA

Roy mengatakan pembatasan itu sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. "Betul, jadi ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas, Bulog dalam pembicaraan bersama kami ritel. Pembatasan ini antara 2-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," ujarnya, pekan ini.

Menurut dia, kebijakan pembatasan dilakukan untuk mengatasi *panic buying* mengingatharga mahal dan pasokan beras yang mulai mengkhawatirkan. "Mengingat ketidakstabilan beras akibat badai El nino, dan impor, dengan impor sekitar 400 ribu ton diharapkan segera tiba. Saat ini sudah masuk 1,6 juta ton, dan sisa 400 ribu ton diperkirakan tiba dalam beberapa hari atau bulan ini. Hal ini diharapkan meningkatkan ketersediaan beras," katanya seperti dikutip *CNNIndonesia.com*.

Roy mengakui kebijakan pembatasan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pembatasan tersebut juga tidak hanya berlaku untuk beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) melainkan juga semua varian beras. "Iya betul, ini gak ada jalan lain karena masalah stok atau jumlah ini belum signifikan," katanya. Dalam hal ini, Roy mengatakan pembatasan pembelian beras akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

Secara terpisah, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai langkah ritel membatasi pembelian beras menunjukkan pasokan beras kian terbatas. Ia yakin akar masalah sengkaret beras tak berubah, yakni terbatasnya produksi domestik. Hal itu membuat Bulog tidak optimal menyerap beras dalam negeri untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP).

Yusuf mendesak pemerintah serius mengatasi permasalahan ini. Terlebih, dia melihat harga beras naik konsisten sejak Agustus 2022-Agustus 2023. Menurut dia, kenaikan itu menjadi pertanda masalah struktural beras yang serius. "Pola kenaikan harga beras dalam setahun terakhir ini mengkhawatirkan karena tidak terdapat tendensi harga turun meski pemerintah telah mengimpor beras 500 ribu ton sejak akhir 2022," ujarnya.

"Kemudian kita melalui panen raya dari Maret 2023-Juni 2023 dan tidak turun juga (harga beras) meski pemerintah di tahun ini telah menetapkan impor beras 2 juta ton dan cadangan beras Bulog kini telah di kisaran 1,5 juta ton," imbuh Yusuf.

Menurut dia, kenaikan harga beras yang liar bisa merambat ke pangan lain. Terlebih masih ada ancaman El Nino. Jika dibiarkan katanya, gejolak harga pangan ini akan merambat ke inflasi Indonesia yang berpotensi mendorong ke kisaran 4 persen.

Analisis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mempertanyakan keabsahan data pemerintah soal stok beras saat ini, termasuk hasil impor. Pasalnya, ia meyakini pembatasan pembelian beras di toko ritel jadi bukti kelangkaan.

Dia menyebut kelangkaan beras sudah terjadi sejak tahun lalu karena produksi nasional turun. Penurunan diperparah banyaknya gagal panen di awal 2023 ini. Di tengah kegagalan itu katanya, solusi pemerintah hanya impor dan impor.

Syaiful menyebut imporkali ini tidak mudah karena para negara eksportir beras membatasi diri dan bahkan menutup ekspor. Pada akhirnya, ketersediaan beras nasional di ujung tanduk karena defisitnya cukup serius.

Meskipun pemerintah mengklaim stok beras di Bulog ada 1,6 juta ton dan dalam perjalanan 400 ribu ton, Syaiful menilai jumlah



PEMBATASAN PEMBELIAN BERAS OLEH TOKO RITEL : Pekerja mengangkat beras saat bongkar muat di Pasar Induk Beras Cipinang (PICB), Jakarta, Rabu (4/10/2023). Sejumlah toko ritel menerapkan pembatasan pembelian beras maksimal dua atau tiga kemasan untuk setiap konsumen demi pemerataan dan menjaga ketersediaan stok beras.

tersebut tidak akan menutupi kelangkaan beras di pasar. Harga beras tidak akan turun karena defisit kebutuhan nasional terlalu dalam.

"Kondisi ini terbukti karena pemerintah menetapkan kembali untuk impor 1 juta ton beras di 2024 yang menandakan kondisi belum kembali normal di tahun depan. Pertanyaannya, jika sekarang terjadi pembatasan pembelian beras di ritel, benarkah stok beras impor yang disampaikan pemerintah ada 2 juta ton? Jangan-jangan memang jumlah realisasi impor tidak sebesar yang disampaikan," tuturnya.

Ditir Perum Bulog Budi Waseso (Buwvas) mengungkapkan, alasan pihaknya tidak menyerap gabah petani lokal. Menurut dia, Bulog lebih banyak menyerap beras dari impor lantaran pihaknya dibatasi ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 5.000 per kg.

Sementara harga GKP di tingkat petani lokal saat ini menembus Rp 7.400 hingga Rp 7.600 per kg. "Di satu sisi, kami lihat ada keuntungan petani yang menikmati harga tinggi. Karenaitu Bulog tidak menyerap gabah petani," ujar Buwvas saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang (PICB), Jakarta,

Rabu (4/10).

Oleh sebab itu, Bulog kini menggunakan beras hasil impor untuk menstabilkan harga. Impor beras tahun ini sebanyak 2 juta ton dilakukan untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan begitu, ketika harga beras naik, pemerintah dapat menggelontorkan stok tersebut untuk menekan inflasi.

Permainan Swasta?

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian paham pembatasan beras di toko ritel demi mencegah *panic buying*. Namun, dia menaruh curiga pada swasta yang diduga bermain dalam suplai beras.

Eliza meminta pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu akar masalah lonjakan harga hingga pembatasan ini guna mengetahui apakah masalah itu terjadi karena produksi beras anjlok atau ternyata ada indikasi spekulasi.

Terlebih, dia mendengar ada kabar heboh aksi pembelian gabah dengan harga tinggi oleh korporasi baru-baru ini. "Hampir 90 persen suplai beras itu dikendalikan oleh swasta, termasuk di dalamnya rumah tangga petani, penggilingan kecil, dan penggilingan besar. Sa-

yang, datanya itu tidak tersedia. Kurang lebih hanya 10 persen saja yang dipegang Bulog, di mana datanya bisa kita telusuri karena di-update berkala," jelas Eliza.


"Memang perlu dibuat dulu database suplai beras. Selama ini kita cuma tahu produksi gabah di berbagai wilayah, namun belum ada data beras yang dikendalikan swasta per wilayah. Ini yang semestinya diperbaiki dulu. Jika tidak ada basis data yang akurat, sampai kapanpun persoalan beras ini akan terus berulang. Konsumen menjadi korban," kritiknya.

Yusuf Wibisono juga ikut menyuarakan titik ini. Menurutnya penurunan kapasitas produksi nasional diperburuk oleh kelemahan tata niaga beras. Dia melihat ada perubahan besar dalam 5 tahun terakhir. Dalam perubahan ini, jalur distribusi dan pemasaran beras yang dulu dikuasai Bulog serta penggilingan kecil hingga menengah, kini didominasi penggilingan dan pabrik beras besar.

Dia yakin masuknya pemain besar ke jalur distribusi dan pemasaran beras mengubah pasar di hal. Pada akhirnya, persaingan menguat dengan memerebutkan gabah kering panen (GKP) yang stoknya terbatas. @bari/mohar/fha

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Pemerintah Kaji Perpanjangan Bansos Beras Hingga Desember	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	6	
Author	Bari/ant	

Pemerintah Kaji Perpanjangan Bansos Beras Hingga Desember

NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah sedang meninjau kembali bantuan sosial (bansos) beras untuk diperpanjang menjadi September-Desember 2023, dari yang semula September-November 2023.

"Sedang di-review. Kalau oke, nanti (diperpanjang) sampai Desember. Kalau oke lagi, sampai Januari, Februari," ujar Erick Thohir, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai meninjau stok dan harga beras di Pasar Rawamangun. Sebelumnya, mereka meninjau operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang. Erick merujuk pada bansos masing-masing 10 kilogram beras per bulan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tiga bulan, yakni September, Oktober, dan November 2023. Bansos tersebut merupakan

paket kedua selama 2023 setelah jumlah yang sama diberikan pada Maret, April, dan Mei 2023. Ia menegaskan bahwa rencana perpanjangan pemberian paket bansos beras belum diputuskan oleh pemerintah. Yang terpenting, kata dia, adalah fokus masyarakat dalam meningkatkan produksi dalam negeri. "Kalau ternyata (bansos) diperpanjang, alhamdulillah," kata Erick.

Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan bantuan pangan senilai Rp8 triliun kepada 21,3 juta KPM. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan solusi yang diberikan kepada pemerintah dalam menghadapi tingginya harga pangan. "Inilah solusi yang diberikan," ujar Erick.

Ia mengungkapkan bahwa selama sepekan, ia ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk rapat dengan Bulog, Badan Pangan, serta pemerintah daerah untuk memastikan stok beras aman dan terkendali.

"Melihat situasi dunia, harga pangan ini tertinggi selama 7 tahun terakhir. Tidak hanya beras, minyak, jagung, dan lain-lain juga," ujar Erick.


Oleh karena itu, Erick Thohir mengajak masyarakat untuk mendorong produksi beras dalam negeri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menekan harga beras. Erick Thohir memaparkan bahwa stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang sudah mencapai 31.410 ton. Stok tersebut kurang 4.000 ton dari target yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yakni 35 ribu ton. "Ini yang harus kita dorong terus supaya kita mandiri. *Insyallah* bisa," ucapnya.

Berdasarkan data dari Food Station, harga rata-rata beras medium di PIBC pada 2 Oktober 2023 sebesar Rp11.185, lebih rendah Rp1.415 dari harga beras pada 14 September 2023 yang mencapai Rp12.600 per kilo. "Berdasarkan data persentase penurunan harga beras

medium ini sekaligus menjadi yang terbesar di Pasar Cipinang sepanjang triwulan kedua sempat mencapai Rp12.575 per kg," kata Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiryaryo.

Pamrihadi memaparkan, penurunan harga itu terjadi setelah Perum Bulog merealisasikan tambahan alokasi beras medium sebanyak 31.410 ton. Beras yang dialokasikan tersebut, merupakan bagian dari target sebanyak 35 ribu ton beras program bantuan pasokan stabilisasi harga pemerintah (SPHP) yang disalurkan Bulog ke Pasar Cipinang hingga akhir tahun ini. "Bukan tidak mungkin harga beras medium akan turun lagi, apabila sisa 4 ribu ton beras SPHP bisa terpenuhi sesuai yang ditargetkan," kata dia.

Menurut dia, total alokasi beras SPHP yang ada di Pasar Beras Cipinang tersebut kemudian akan disalurkan ke pengecer di pasar tradisional dan ritel modern Jakarta.. ● bari/ant

Title	Pemkab Lebak Gencar Sosialisasi Pangan Pengganti Beras	
Date	6 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Pemkab Lebak Gencar Sosialisasi Pangan Pengganti Beras

NERACA

Lebak - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten gencar melakukan sosialisasi dan edukasi pangan kepada masyarakat agar mengkonsumsi pengganti beras yang berasal dari umbi-umbian yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. "Kita minta masyarakat tidak hanya kenyang saja dengan ketergantungan konsumsi sama beras, namun beberapa komoditi bisa dijadikan makanan alternatif," kata Kepala Bidang Distribusi dan Sumberdaya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, Benu Dwiyana di Lebak, Kamis (5/10).

Pemerintah Kabupaten Lebak hingga kini terus mensosialisasikan pangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak ketergantungan bahan pokok beras. Karena itu, masyarakat tidak selalu menggantungkan beras untuk konsumsi sehari-hari, sehingga sehingga perlu adanya dilakukan diversifikasi pangan.

Diversifikasi pangan bisa saja dengan komoditas umbi-umbian, seperti talas, singkong, ubi jalar, gandum, sagu, jagung, sukun sebagai pengganti beras.

Potensi komoditas umbi-umbian di daerah ini tinggi namun masyarakat belum mampu mengelola keragaman pangan. Kebanyakan warga setempat mengelola makanan komoditas umbi-umbian itu direbus atau digoreng sehingga tidak memiliki mutu dan kualitas rasa.

Padahal, kata dia, jika umbi-umbian diproduksi menjadi bolu, lapis, roti, keripik yang memiliki rasa enak, lezat juga banyak kandungan gizi. Selain itu juga makanan umbi-umbian bisa dijadikan panganan dengan memiliki kadar protein yang cukup tinggi dibandingkan beras. "Kami berharap warga bisa membudayakan makanan pokok alternatif dari beras ke umbi-umbian," kata Benu.


Menurut dia, pemerintah daerah berdasarkan imbauan Bupati Lebak bahwa masyarakat jangan sampai menggantungkan bahan makanan pokok pada beras saja. Sebab, produksi beras ke depan bisa menurun dengan maraknya berbagai pembangunan.

Untuk itu, pihaknya minta masyarakat agar mengurangi konsumsi makanan pokok beras. Selain itu juga orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk makan makanan pokok yang lain selain nasi.

"Kami mengencarkan sosialisasi pengganti pangan beras itu agar warga sehari-hari dapat mengkonsumsi aneka makanan alternatif sebagai makanan pokok," katanya.

Sementara itu, sejumlah warga Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengatakan bahwa makanan alternatif itu cukup baik untuk kesehatan, seperti rebus jagung, ubi jalar, singkong dan talas.

"Kami sudah dua tahun tidak mengkonsumsi beras dan hanya mengkonsumsi komoditas umbi-umbian sehingga dapat terhindar dari diabetes melitus," kata Yayah (55) warga Rangkasbitung Kabupaten Lebak. ●ant

Title	PUPUK SUBSIDI	 Kementerian Pertanian
Date	6 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	3	
Author	Neraca/Antarafoto/Budi Candra Setya/foc	



NERACA/Antarafoto/Budi Candra Setya/foc

PUPUK SUBSIDI : Pekerja menurunkan pupuk dari kapal di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (4/10/2023). Data pupuk Indonesia menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi di Jawa Timur sebanyak 203.645 ton atau tiga kali lipat dari ketentuan minimum pemerintah sebagai persiapan musim tanam.